

# LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2024



TAHUN TEMATIK INDIKASI GEOGRAFIS



## **PESAN DIREKTUR JENDERAL**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menyelesaikan dan mempublikasikan Laporan Tahunan Tahun 2024 ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pencapaian yang telah diraih selama setahun terakhir dalam rangka pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan dan perubahan, baik dari segi kebijakan, regulasi, maupun perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun, dengan komitmen dan kerja keras, DJKI berhasil mencapai berbagai kemajuan signifikan, antara lain dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kekayaan intelektual, memperkuat sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, serta mendukung inovasi yang berkelanjutan.

Laporan ini mencakup berbagai informasi terkait kebijakan, program, kegiatan, dan pencapaian yang telah dilakukan, serta strategi yang akan dijalankan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kami juga ingin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual yang mendukung kemajuan ekonomi kreatif dan pembangunan nasional.

Kami berharap laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJKI, serta menjadi sumber informasi yang berguna bagi semua pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang luar biasa dalam mewujudkan pencapaian-pencapaian ini.

Semoga kerja keras dan dedikasi kita dalam mengelola kekayaan intelektual di Indonesia dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan bangsa.

Hormat kami,



Razilu  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

## DAFTAR ISI

<b>PESAN DIREKTUR JENDERAL</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>PROFIL ORGANISASI</b> .....	<b>1</b>
<b>LINTAS KEGIATAN DJKI 2024</b> .....	<b>3</b>
<b>TAHUN TEMATIK INDIKASI GEOGRAFIS</b> .....	<b>10</b>
Rencana Aksi dan Target Kinerja.....	12
<b>PRIORITAS NASIONAL KIK 2020 - 2024</b> .....	<b>15</b>
<b>INOVASI DJKI 2024</b> .....	<b>19</b>
A. Rancangan Undang Undang Paten.....	19
B. Sistem Manajemen Mutu Layanan Kekayaan Intelektual ISO 9001:2015.....	21
C. Sistem Manajemen Anti Penyusutan Pada Layanan Kekayaan Intelektual ISO 37001:2016.....	22
D. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022.....	23
E. Sistem Manajemen Layanan TI ISO 20000-1:2018.....	24
F. GOV MEDIA AWARDS 2024.....	25
G. Bronze Winner - Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2024.....	26
H. Program Inovatif untuk Negeri - Merdeka Awards 2024.....	27
I. INOVASI LAYANAN DJKI 2024.....	28
<b>NILAI KINERJA DJKI 2024</b> .....	<b>35</b>
A. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	35
B. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.....	37
C. Pelaksanaan SPIP, IEPK, MRI.....	38
<b>KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DALAM ANGKA</b> .....	<b>39</b>
A. Permohonan Kekayaan Intelektual.....	39
B. Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual.....	53
C. Kekayaan Intelektual Indonesia.....	55
D. Peta Indikasi Geografis Indonesia.....	57

## **PROFIL ORGANISASI**

### **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Organisasi Tata Kelola Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas fungsi sebagai berikut :

#### **TUGAS**

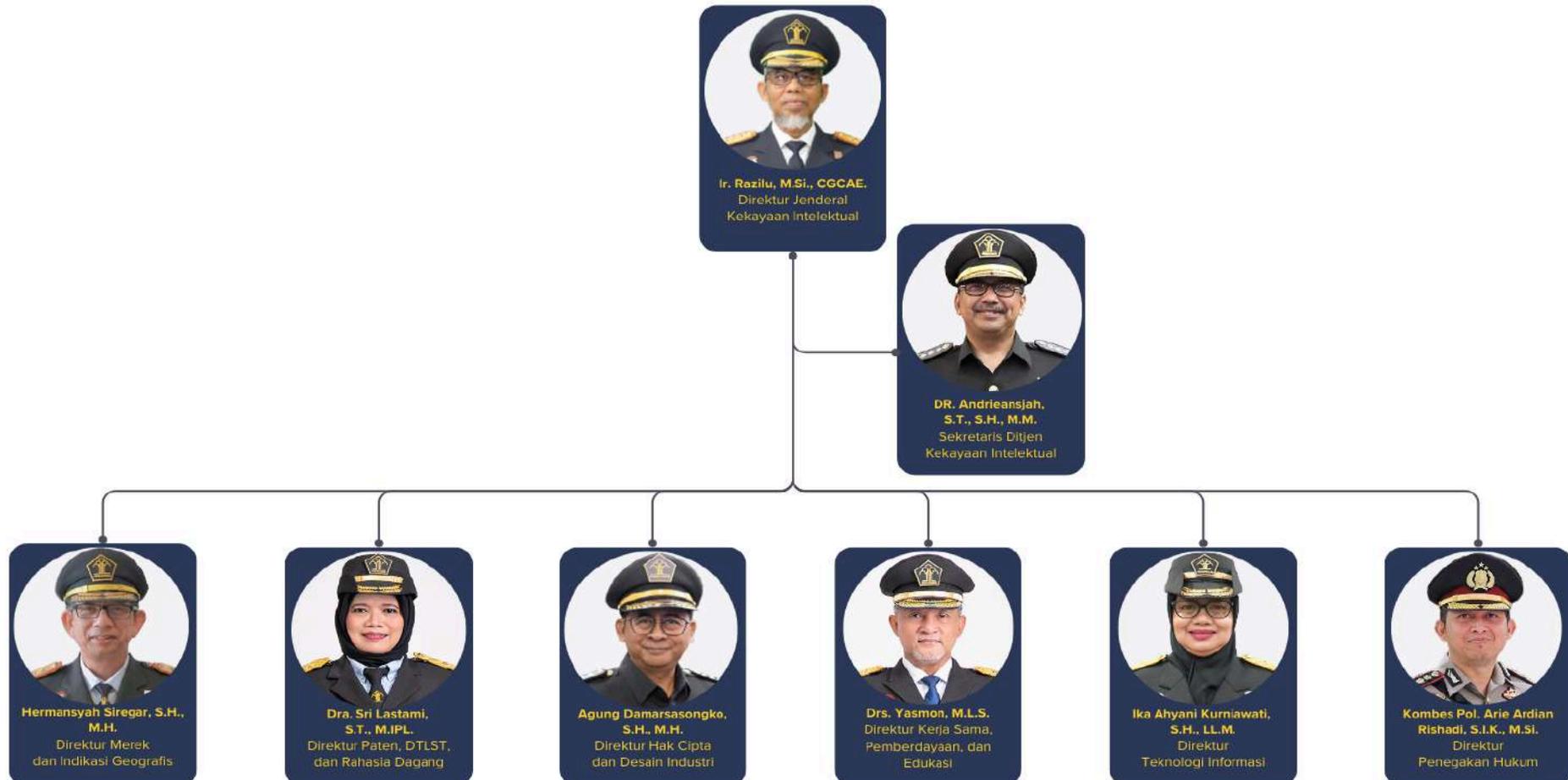
Merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### **FUNGSI :**

1. Perumusan Kebijakan
2. Pelaksanaan Kebijakan
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
6. Pelaksanaan fungsi lain

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki perpanjangan tangan pada 33 wilayah provinsi di Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

# Struktur Organisasi DJKI



## LINTAS KEGIATAN DJKI 2024



### Indonesia Ikuti Perundingan Indonesia-EU CEPA Putaran 16 di Brussels

Selasa, 9 Januari 2024

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive

Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah memasuki putaran ke-16 pada 9 – 11 Januari 2024 di Brussels, Belgia.



### DJKI Gelar Pertemuan dengan Homeland Security Investigation Amerika Serikat

Kamis, 25 Januari 2024 Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menguatkan sinergi antar lembaga baik

nasional maupun internasional guna memerangi pelanggaran atas kekayaan intelektual (KI).



### DJKI Ajak Polytron Hasilkan Invensi Electronic Vehicle

Senin, 19 Februari 2024

Slamet Riyadi Ketua Tim Kerja Permohonan dan Publikasi Paten sangat mengapresiasi komitmen Polytron sebagai industri dalam negeri yang menggunakan

paten sebagai *competitive advantage* dalam industrinya.



### Peduli Hak Konsumen, DJKI Terima Kunjungan dari Louis Vuitton Singapura

Selasa, 27 Februari 2024

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan dari perwakilan Louis Vuitton Singapura mengenai penegakan hukum

kekayaan intelektual (KI), khususnya yang berkaitan dengan merek Louis Vuitton, Selasa, 27 Februari 2024. Sebelumnya, di tahun 2024 ini, negara Indonesia menjadi salah satu negara prioritas bagi Louis Vuitton. Hal tersebut dikarenakan penduduk Indonesia memiliki ketertarikan yang tinggi dengan merek tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia dikatakan sebagai salah satu pasar yang penting bagi Louis Vuitton.



### **DJKI Ikuti Perundingan Putaran Ketujuh dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia - Kanada**

Senin, 4 Maret 2024

Semarang - Indonesia dan Kanada sepakat untuk membuat kerja sama demi memajukan perekonomian kedua negara. Upaya kerja sama itu dirundingkan dalam

Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang dimulai sejak 2021 hingga saat ini. Perundingan ekonomi ini menyangkut banyak bidang, termasuk kekayaan intelektual.

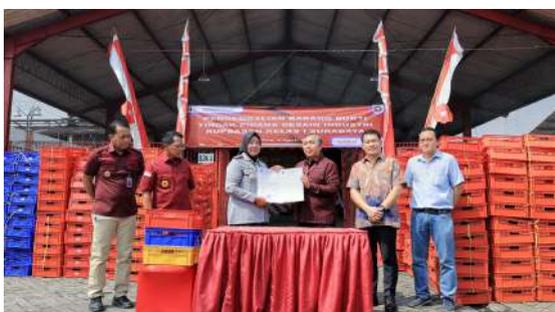


### **DJKI Berhasil Raih Penghargaan Public Relations Indonesia Awards 2024**

Kamis, 7 Maret 2024

Denpasar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil mendapatkan penghargaan pada ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024. Peraih

Bronze Award pada kategori "Owned Media (E-Magazine) diberikan atas Buletin Media HKI Volume 3 Tahun V/2023.



### **DJKI Kembalikan 1.668 Krat Gelas Kepada PT Karya Indah Multi Kreasindo**

Jumat, 5 April 2024

Surabaya - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam hal ini Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (KI) Anom Wibowo menyerahkan barang bukti sebanyak 1.668

Krat Gelas kepada PT Karya Indah Multi Kreasindo pada Kamis, 4 April 2024, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya. Sebelumnya diketahui pada tanggal 20 Januari 2023, DJKI menerima pengaduan pelanggaran KI dengan nomor HKI.7.KI.08.01.01/Desain Industri/01/2023 yang

dilayangkan oleh salah satu pemilik desain industri Krat Gelas yang sudah terdaftar sejak tanggal 6 Februari 2020.



## **DJKI Ingatkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Sistem KI di Indonesia Melalui Seminar Perempuan Indonesia**

Selasa, 30 April 2024

Jakarta - Perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 April di setiap tahunnya bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) pada kehidupan sehari-hari serta mengapresiasi hasil olah pikir, karya, kreativitas dan kontribusi para pencipta karya dan inovator untuk pengembangan kualitas kehidupan masyarakat di seluruh dunia.



## **Perangi Situs Ilegal, DJKI dan WIPO Bahas Penegakan Hukum KI Melalui WIPO ALERT**

Selasa, 7 Mei 2024

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dalam kesempatan ini Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian

Sengketa melakukan pertemuan bersama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dan anggota Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual (KI) pada Senin, 6 Mei 2024, di JS Luwansa, Jakarta.



## **Menkumham Pimpin Delegasi RI dalam Konferensi Diplomatik di WIPO Jenewa**

Senin, 13 Mei 2024

Jenewa - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna H. Laoly memimpin delegasi RI menghadiri Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument

relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources (GRATK) yang diselenggarakan di Kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada 13 s.d. 24 Mei 2024.



## Sukses Jalankan Operasi Gabungan, DJKI Terima Penghargaan dari Pemerintah Korea Selatan

Minggu, 2 Juni 2024

Lyon – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menerima penghargaan dan apresiasi dari

Pemerintah Korea Selatan melalui Korean National Police Agency atas penanganan kasus TV DOL pada Kamis, 30 Mei 2024 di Lyon, Prancis.



## Menkumham Serahkan Penghargaan Kepada Insan KI 2024

Rabu, 12 Juni 2024

Jakarta - Sebagai salah satu rangkaian dari Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2024, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly berkesempatan menyerahkan beberapa penghargaan

kepada kreator dan inovator di Indonesia pada kegiatan pembukaan Forum Indikasi Geografis (IG) Nasional, Temu Bisnis, dan Apresiasi Insan KI 2024 di Hotel Shangri-la, Jakarta, pada Rabu, 12 Juni 2024.



## Indonesia Perkenalkan 135 Produk Indikasi Geografis di Sidang Majelis Umum ke-65 WIPO

Selasa, 9 Juli 2024

Jenewa - Indonesia mendapatkan kesempatan emas untuk memperkenalkan 135 produk indikasi geografis lokal pada

Sidang Majelis Umum ke-65 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Produk-produk yang dipamerkan meliputi kopi, produk perkebunan, rempah, kerajinan tangan, hingga perikanan dan kelautan.



## Lindungi Hak Masyarakat Adat di Jawa Barat, Menkumham Serahkan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal dan Sertifikat Indikasi Geografis

Selasa, 23 Juli 2024

Bandung - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menyerahkan 35 sertifikat kekayaan intelektual komunal (KIK) kepada masyarakat adat dan satu sertifikat indikasi geografis milik Jawa Barat melalui acara Festival Kesenian Masyarakat Adat Piton Ajen di Kawasan Ekowisata dan Budaya Alam Sentosa, Kabupaten Bandung pada Selasa, 23 Juli 2024.



### **Dirjen Kekayaan Intelektual Berikan 100 Sertifikat KI pada Festival Layanan Kumham Banten 2024**

Rabu, 7 Agustus 2024

Tangerang - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen menyerahkan 100 sertifikat kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat wilayah Provinsi Banten melalui acara Festival Layanan Hukum dan HAM Banten 2024 pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Seratus sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat wilayah Provinsi Banten ini terdiri dari 72 sertifikat merek, 23 surat pencatatan hak cipta, dan 4 sertifikat kekayaan intelektual komunal (KIK).



### **DJKI Hadiri Raker Pansus RUU Paten: Pembentukan Panja dan Pembahasan DIM Dimulai**

Selasa, 27 Agustus 2024

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali mengikuti Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten pada Selasa, 27 Agustus 2024, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).



### **DJKI Tekankan Pentingnya Transformasi Digital dalam Konferensi Belt and Road di Beijing**

Jumat, 13 September 2024

Beijing - Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan transformasi digital di bidang kekayaan intelektual. Dalam presentasinya, Yasmon menjelaskan langkah-langkah strategis DJKI, seperti revisi Undang-Undang Paten dan Desain Industri, serta pengembangan sistem administrasi kekayaan intelektual berbasis teknologi.



### **DJKI Raih Penghargaan dalam Merdeka Awards 2024**

Kamis, 19 September 2024

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM berhasil memperoleh penghargaan pada ajang Merdeka Awards 2024 yang diselenggarakan pada 19 September 2024 di Auditorium SCTV Tower.



### **DJKI Sita 971 Produk Pelanggaran KI di Jakarta Barat**

Kamis, 17 Oktober 2024

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil melakukan penyitaan terhadap 971 produk pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang terdiri dari 163 botol bayi dan 808 nipple dot dengan merek Comotomo pada Selasa, 14 Oktober 2024, di wilayah Jakarta Barat.



### **DJKI Raih Sertifikat ISO 9001:2015, Tunjukkan Komitmen Terhadap Layanan Publik Berkelas Dunia**

Selasa, 22 Oktober 2024

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ingin mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang diberikan oleh TUV Nord pada 2013. Sertifikasi ini merupakan bukti nyata komitmen DJKI dalam memberikan layanan publik di bidang Kekayaan Intelektual yang berstandar internasional, sekaligus menandai langkah maju DJKI dalam meningkatkan kinerja dan memenuhi harapan pelanggan.



### **DJKI Serahkan Enam Surat Pencatatan Hak Cipta di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo**

19 November 2024

Situbondo - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyerahkan secara simbolis enam surat pencatatan hak cipta yang terdiri dari musik, lagu, dan teks, seraya memenuhi undangan kegiatan Haul Majemuk yang dilaksanakan di Pondok Pesantren (ponpes) Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada Selasa, 19 November 2024.



### **Kekayaan Intelektual Adalah Penopang Kemandirian Ekonomi**

Selasa, 19 November 2024

Banyuwangi - Kekayaan intelektual (KI) adalah penopang kemandirian ekonomi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu saat menghadiri kegiatan pendampingan pendaftaran bagi produk indikasi geografis (IG) di Kabupaten Banyuwangi, pada Selasa, 19 November 2024.



### **Penutupan Tahun IG 2024 & Launching Tahun Hak Cipta & Desain Industri 2025: DJKI Catat Kenaikan Permohonan**

Senin, 2 Desember 2024

Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Tahun Tematik Indikasi Geografis (IG) 2024 telah menjadi momentum penting dalam upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan bernilai ekonomi tinggi.

## **TAHUN TEMATIK INDIKASI GEOGRAFIS**

Indikasi Geografis (IG) adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, yang memberikan ciri khas, kualitas, dan reputasi tertentu, yang berasal dari faktor lingkungan geografis seperti alam, manusia, atau kombinasi keduanya. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, IG berperan penting dalam melindungi produk lokal, mempertahankan keaslian, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, perlindungan dan pemanfaatan IG sangat penting untuk mendukung perekonomian nasional dan daerah, khususnya bagi produk unggulan yang dihasilkan masyarakat di berbagai wilayah.

Penerapan sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia masih terbilang baru, dibandingkan dengan Uni Eropa yang sudah mengenal sistem perlindungan ini sejak awal abad ke 20, sedangkan Indonesia baru menerapkan sistem perlindungan Indikasi Geografis ini pada tahun 2007, sehingga tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan ekosistem Indikasi Geografis masih sangat rendah. Produk Indikasi Geografis terdaftar memiliki karakteristik beragam dengan karakteristik yang khas serta tersebar dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, kerajinan, dan hasil industri.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menetapkan Tahun Tematik Indikasi Geografis, yang bertujuan memperkuat perlindungan dan promosi produk berbasis IG. Penetapan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya IG.

Selama tahun 2024, tercatat 44 IG terdaftar, meningkat sebesar 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, jumlah permohonan yang masuk mencapai 62 permohonan. Hingga kini, total IG terdaftar ada 182 meliputi 167 IG domestik dan 15 IG internasional. Jumlah ini merupakan peningkatan permohonan IG terbesar, kurang lebih 264,70% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang menerima sebanyak 17 permohonan IG. Dari tahun 2007 - 2024 sebanyak 332 permohonan dan tahun 2017 - 2024 sebanyak 149 penyelesaian. Selain itu terdapat catatan penting yaitu tersusunnya Draft Final Roadmap (Peta Jalan) Indikasi Geografis Nasional 2025 – 2029 yang pada proses penyusunannya melibatkan seluruh stakeholder IG nasional lintas Kementerian/Lembaga/Dinas baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Dalam upaya meningkatkan daya saing dan melindungi kekayaan produk lokal, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemendiknas) telah resmi meluncurkan Peta Jalan Indikasi Geografis (IG) Nasional 2025-2029 pada tanggal 30 Desember 2024. Peta Jalan IG Nasional tersebut disusun sebagai panduan strategi nasional untuk perlindungan dan pengembangan produk unggulan berbasis geografis di Indonesia. Dengan adanya Peta Jalan IG ini, pengelolaan dan pengembangan IG di Indonesia dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Dalam Peta Jalan IG ini terdapat 75 rencana aksi yang melibatkan kontribusi berbagai kementerian dan lembaga terkait. Untuk memastikan implementasi yang optimal, maka terdapat 6 (enam) langkah strategis yang telah dirumuskan.

Enam langkah strategis tersebut terdiri dari penguatan regulasi; sosialisasi dan edukasi; penguatan infrastruktur berbasis digital; akselerasi jumlah produk IG; pengembangan kapasitas pemilik hak IG; serta peningkatan pemasaran domestik dan ekspor.

Peta Jalan IG Nasional juga akan berfokus pada digitalisasi pengelolaan IG dengan mengembangkan aplikasi untuk mempermudah pengajuan, pengelolaan dan pengawasan IG. Selain itu, platform ini akan mendukung strategi pemasaran produk IG agar dapat bersaing di pasar global. Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional ini adalah refleksi dari komitmen kita untuk melindungi dan mengembangkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh bangsa kita.

Sebanyak tiga produk asal Indonesia, yaitu Lada Putih Muntok, Garam Amed Bali, dan Kopi Arabika Gayo mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Uni Eropa yang diserahkan oleh Komisaris Pertanian Uni Eropa Janusz Wojciechowski.



## **Rencana Aksi dan Target Kinerja**

Rencana Aksi dan Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2024 memiliki catatan pelaksanaan pelaporan:

1. Pelaporan melalui website kinerja Kementerian Hukum dan HAM
2. Pelaporan dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan,
3. Pelaksanaan verifikasi pelaporan dilaksanakan setiap triwulan dengan mekanisme hybrid, dengan verifikator merupakan masing-masing satuan kerja eselon II DJKI terkait

Isu permasalahan yang diangkat pada rencana aksi tahun ini yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi rencana aksi ini dibagi menjadi beberapa periode. Pada periode Januari - Maret telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah; inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat; identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis sehingga menghasilkan capaian berupa daftar inventarisasi produk IG dan daftar pihak-pihak terkait yang terlibat. Pada periode April - Agustus telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses; terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan IG (Pokja pengawasan IG) di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil / Gubernur; dan menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi Pemerintah Daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah sehingga menghasilkan laporan hasil koordinasi, SK Pokja per wilayah, dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG. Pada periode September - November telah dilakukan Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses sehingga menghasilkan bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Kemudian, pada periode Desember telah dilakukan koordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 dan tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk sehingga menghasilkan Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025 dan Laporan Tindak Lanjut Pokja.

Selama tahun 2024, tercatat 44 IG terdaftar, meningkat sebesar 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah Indikasi Geografis yang sudah terdaftar saat ini, pengawasan menjadi satu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, hal ini untuk memastikan reputasi, karakteristik dan kualitas pada produk IG terdaftar masih tetap terjaga. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan sesuai amanat Undang-undang adalah rentang kendali yang terlalu jauh dan panjang dari Pemerintah Pusat ke semua Pemerintah Daerah dimana produk IG dihasilkan. Sebagai upaya untuk menjangkau semua produk Indikasi Geografis yang ada di daerah dapat terawasi, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan pada setiap daerah dimana produk IG tersebut dihasilkan. Pembentukan Pokja Pengawasan Indikasi Geografis di masing-masing daerah diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

SK Pokja Pengawasan Indikasi Geografis di masing-masing daerah sudah terbentuk dengan total sebanyak 33 Pokja Pengawasan. Pembentukan Pokja Pengawasan Indikasi Geografis di masing-masing daerah memiliki tujuan memperkuat peran Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya di daerah dalam mengawasi produk IG terdaftar yang ada di daerah masing-masing, memperluas jangkauan keterwakilan Pemerintah Pusat dalam pengawasan IG terdaftar di seluruh Indonesia, menjamin tetap adanya reputasi, karakteristik dan kualitas, yang menjadi dasar diberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap satu produk, dan mencegah penyalahgunaan Indikasi Geografis secara tidak sah oleh pihak lain. Objek pengawasannya yaitu untuk melihat fakta di lapangan masih adanya kesesuaian karakteristik, kualitas suatu produk Indikasi Geografis terdaftar serta penggunaan nama indikasi geografis yang tidak semestinya. Pokja Pengawasan indikasi geografis di daerah dilakukan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengawasan indikasi geografis. Waktu pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara berkala dengan menimbang beberapa pertimbangan. Pemerintah daerah merupakan dinas dan/atau lembaga daerah yang disesuaikan dengan produk IG yang ada di daerah tersebut. Sasaran pengawasan Indikasi Geografis yaitu pemilik hak Indikasi Geografis dan pelaku penyalahgunaan nama Indikasi Geografis.

Pembentukan Pokja Pengawasan dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan produk Indikasi Geografis terdaftar yang ada di satu daerah. Pemangku kepentingan dimaksud adalah Dinas Pembina baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Akademisi, Aparat Penegak Hukum,

Pemerhati IG, Asosiasi dan masyarakat umum. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di setiap Provinsi melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di daerah untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembentukan Pokja pengawasan IG Terdaftar. Dimana setelah dilakukan koordinasi akan dimintakan penunjukan personal yang kompeten untuk duduk sebagai anggota Tim Pokja, yang akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Tim yang sudah terbentuk akan menyusun program kegiatan yang akan dilakukan selama masa tugas dari Tim sesuai Surat Keputusan. Selain itu Tim juga berhak mendapat pembekalan pengetahuan terkait mekanisme dan teknis pengawasan serta sistem pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan dari narasumber yang kompeten. Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan semua Pemilik Hak IG terdaftar terkait rencana dan agenda kegiatan dari Pokja Pengawasan yang sudah dibentuk di masing-masing daerah.

## PRIORITAS NASIONAL KIK 2020 - 2024

### **Prioritas Nasional: Kekayaan Intelektual Komunal**

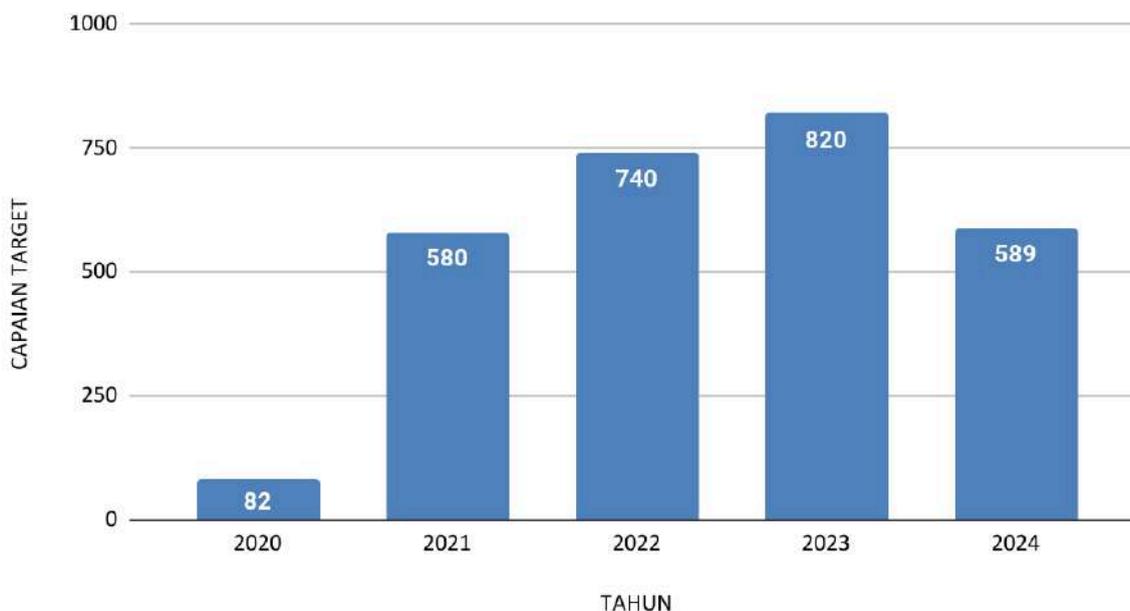
Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), definisi KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis (Potensi IG). Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menandai komitmen Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atas inventarisasi KIK sebagai bentuk perlindungan yang bersifat defensif terhadap KIK. Perlindungan defensif yang dilakukan dalam bentuk inventarisasi database, bertujuan untuk mencegah dan menyetop penggunaan hak kekayaan intelektual komunal oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait dengan KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam, DJKI ditunjuk sebagai *focal point* dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) / Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDG,PT,EBT). DJKI berperan sebagai koordinator dan sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan *database* dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar *database* K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional.

Penetapan KIK sebagai salah satu Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 pada rapat tiga pihak (*Trilateral Meeting*) yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan penetapan tahun 2020 sebagai tahun KIK diwujudkan DJKI melalui kegiatan promosi dan diseminasi KIK kepada Kanwil-Kanwil, pendampingan Kanwil dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya inventarisasi KIK. Poin utama yang disampaikan adalah bahwa inventarisasi bertujuan memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KI Komunal Indonesia, melindungi hak masyarakat adat, mencegah pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil, menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah untuk pemutakhiran data kekayaan budaya di daerahnya, serta tersedianya akses data & informasi aset KIK yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif. Kekayaan Intelektual Komunal menjadi salah satu Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024, dengan dua prioritas yaitu

Penyusunan Instrumen Hukum Nasional KIK dan Pembangunan Pusat Data Nasional KI Komunal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditunjuk sebagai *Focal Point* dalam penyatuan data dan berikutnya pemanfaatan data KI komunal untuk mendorong ekonomi di wilayah.

Capaian dari Prioritas Nasional KIK selama periode Tahun 2020-2024



Prioritas KIK tahun 2020 - 2024 dibangun melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2020 merupakan awal pembentukan Pusat Data Nasional KIK (KI Komunal) dengan target sebanyak 120 dokumen KIK yang tervalidasi (data yang sudah tercatat dan terverifikasi) maka capaian yang diraih di tahun 2020 adalah sebanyak 82 dokumen KIK yang tervalidasi. Data yang terkumpul dalam Pusat Data Nasional KIK tersebut selain dikumpulkan langsung oleh DJKI dari stakeholder seperti Kanwil Kemenkumham, dinas/masyarakat pengemban/kustodian KIK di wilayah secara langsung juga melalui pengumpulan dan integrasi data dari beberapa K/L yang tergabung dalam pengumpulan data KIK nasional.

Tahun 2021 merupakan lanjutan dari proses pengumpulan dan integrasi data yang dimiliki K/L lainnya dalam proses pengembangan pusat data nasional KIK. Ditargetkan terdapat 156 dokumen data KIK yang tervalidasi, adapun capaiannya sebanyak 580 dokumen KIK yang tervalidasi.

Tahun 2022 mulai difokuskan untuk mengembangkan data KIK yang sudah tervalidasi untuk dicari potensi ekonomi/bernilai strategis dari data KIK yang sudah tervalidasi dengan melakukan pendampingan terkait diseminasi KIK dalam rangka

pengumpulan dan inventarisasi KIK dari 33 wilayah. Adapun target di tahun 2022 adalah terdapat 33 layanan pendampingan di 33 wilayah dengan capaian sebanyak 33 layanan dan telah terkumpul sebanyak 740 data KIK yang telah tervalidasi. Sedangkan dalam proses pendampingan tersebut terdapat setidaknya sebanyak 633 KIK yang setidaknya berpotensi untuk diinventarisasi memiliki nilai ekonomi.

Tahun 2023 upaya yang dilakukan untuk percepatan pencapaian Output dengan cara melakukan komunikasi yang intens dengan subbidang KI di Kantor Wilayah serta Dinas terkait untuk melakukan pendataan terkait KI Komunal yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya dilakukan pemetaan terkait adanya nilai ekonomi dan pemanfaatan KI Komunal terkait pelaksanaan benefit sharing. Adapun pada tahun 2023 telah terdapat sebanyak 820 data KIK yang telah tervalidasi. Sedangkan dengan target sebanyak 120 data KIK yang berpotensi ekonomi, maka dari 633 data KIK pada tahun 2022 sebelumnya telah didata (data ini setidaknya berpotensi untuk diinventarisasi memiliki nilai ekonomi), terdapat setidaknya 264 KIK yang berpotensi memiliki nilai ekonomi.

Tahun 2024 Capaian per 31 Desember 2024 telah melampaui target, sehingga pada tahun 2024 telah terdapat data KIK tervalidasi sejumlah 589 dari seluruh Indonesia. Sedangkan dengan target sebanyak 120 data KIK yang berpotensi ekonomi, maka dari 633 data KIK pada tahun 2022 sebelumnya telah didata (data ini setidaknya berpotensi untuk diinventarisasi memiliki nilai ekonomi), terdapat setidaknya 284 KIK yang berpotensi memiliki nilai ekonomi.

Data KI Komunal didapat dengan melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi di beberapa Provinsi seperti, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Maluku, Jawa Timur, melalui monitoring dan evaluasi ini diperoleh data pemanfaatan nilai ekonomi dari beberapa produk kekayaan intelektual komunal terutama motif kain tradisional baik berupa tenun, batik maupun sarung tenun, serta kerajinan dan kesenian tradisional.

Secara umum DJKI telah melakukan beberapa kebijakan selama tahun 2020-2024 guna mengoptimalkan capaian kinerja terkait Program Prioritas Nasional. Adapun kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat kegiatan Prioritas Nasional tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membangun Pusat Data KIK Nasional sebagai bukti kepemilikan dan identitas KIK Indonesia , bukti negosiasi terkait adanya pembagian manfaat, menghindari penyalahgunaan oleh pihak asing dan adanya pengakuan oleh negara asing atas kepemilikan KIK. Contoh : Kasus EBT adanya klaim utk KIK Reog Ponorogo, SDG penggunaan rempah-rempah oleh Perusahaan Kosmetik Shiseido Jepang.
2. Membangun peta potensi ekonomi KIK yang memiliki potensi yang akan dilakukan untuk melihat peluang komersialisasi atas KIK,
3. Melakukan pendampingan pencatatan dan diseminasi kepada pemerintah daerah terkait urgensi inventarisasi KIK.
4. Melakukan pengumpulan data dengan integrasi data KIK yang ada di beberapa KL melalui PKS sebagai awal proses integrasi .

Sedangkan dalam merealisasikan kinerja terkait Prioritas Nasional KIK terdapat beberapa kendala, hambatan, dan tantangan yang dihadapi misalnya: masih kurangnya pemahaman pemerintah daerah dan instansi terkait dengan urgensi inventarisasi KIK sehingga dilakukan diseminasi dan pendampingan. Selain itu terkait data KIK yang masih merupakan data lisan dan referensi terkait data KIK masih ada yang belum dikaji. Masih terbilang sulit dijangkaunya lokasi daerah yang akan dilakukan koordinasi atau kendala jarak yang jauh dan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih. Peran Pemerintah Daerah juga masih dirasa kurang untuk dapat mendorong atau mengkoordinasikan keberadaan kustodian KIK sehingga berkenan dan mau untuk mencatatkan KIK nya.

Atas kendala/hambatan yang dihadapi tersebut, DJKI berinisiatif melakukan terobosan kebijakan terutama melalui rintisan perlindungan defensif dengan adanya pencatatan data KIK pada Pusat Data Nasional KIK yang diikuti dengan langkah kebijakan regulasi dalam bentuk peraturan teknis terkait KIK melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kemudian mulai melakukan pendampingan kepada stakeholder dan kustodian pengemban KIK terkait potensi KIK yang berpotensi ekonomi. Selain itu DJKI juga sedang mempersiapkan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Pemanfaatan KIK sebagai persiapan dalam menyambut kebijakan adanya konsep *access and benefit sharing* atas penggunaan dan pemanfaatan KIK yang tercatat. Namun kami juga merasa masih sangat diperlukan adanya adanya pengaturan KIK dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum positif agar keberadaan perlindungan KIK semakin memiliki dasar hukum yang kuat dan legitimatif. penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Pemanfaatan KIK.

## INOVASI DJKI 2024

### A. Rancangan Undang Undang Paten

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten di Indonesia pada 30 September 2024 menandai perubahan signifikan dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual, khususnya paten. Berikut adalah poin-poin penting terkait RUU ini:



#### Latar Belakang dan Tujuan

1. Perubahan UU No. 13 Tahun 2016: RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Paten yang ada, yang dirasakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum internasional.
2. Mendorong Inovasi: Salah satu tujuan utama dari RUU ini adalah untuk mendorong inovasi nasional, terutama dalam bidang teknologi dan kesehatan, dengan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para inventor.

#### Poin-Poin Penting RUU Paten

1. Hak Eksklusif: RUU ini memberikan hak eksklusif kepada inventor selama 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Ini bertujuan untuk melindungi hasil inovasi dan mendorong komersialisasi.
2. Grace Period: Periode grace untuk publikasi ilmiah suatu paten diperpanjang dari 6 bulan menjadi 12 bulan, memberikan lebih banyak waktu bagi inventor untuk mendaftarkan paten mereka.
3. Pengaturan Inovasi: RUU ini mengatur invensi yang dapat dipatenkan, termasuk penyesuaian untuk produk yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, sesuai dengan standar internasional.

4. Digitalisasi Layanan: RUU ini juga mencakup upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran paten melalui digitalisasi layanan, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah permohonan paten di Indonesia.
5. Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat: Dengan pengesahan RUU ini, inventor dan peneliti mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak kekayaan intelektual mereka, sehingga dapat berinovasi tanpa takut akan pelanggaran hak.

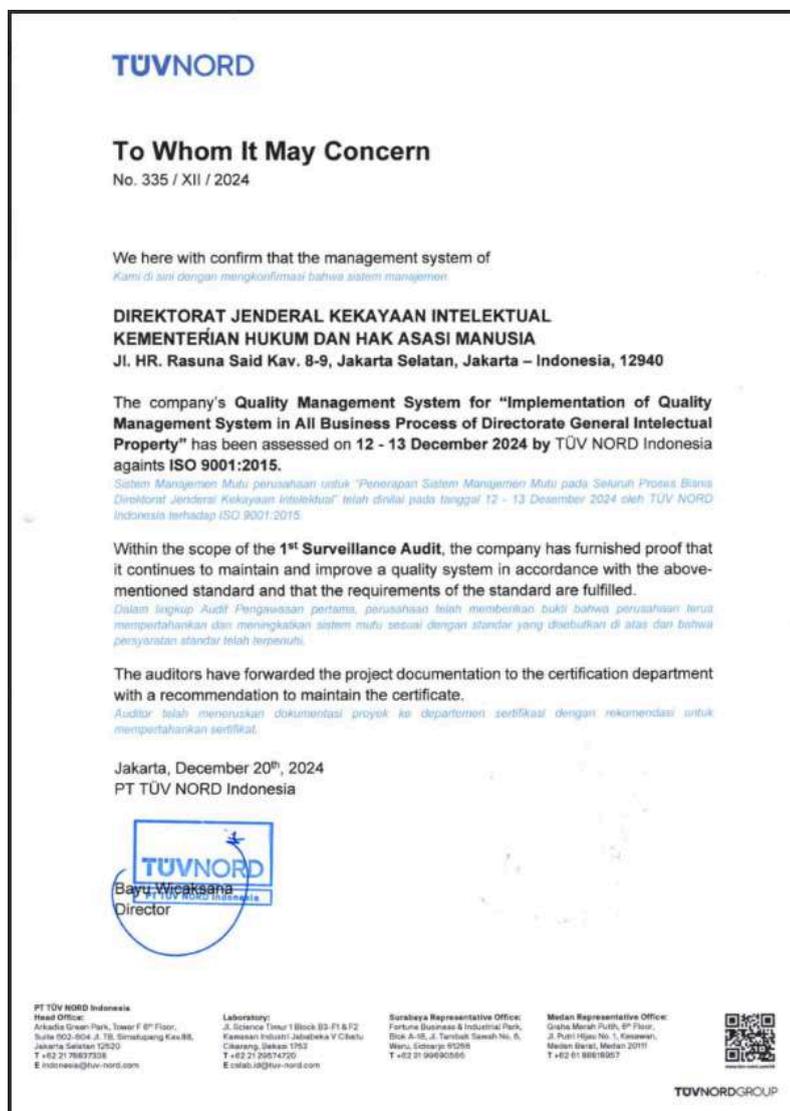
Kemudian, pengesahan RUU Paten diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia dengan:

1. Meningkatkan ekosistem inovasi dan teknologi.
2. Memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global.
3. Menarik investasi asing dalam penelitian dan pengembangan teknologi.

Dengan demikian, RUU Paten ini bukan hanya sekadar regulasi hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen inovasi yang lebih kompetitif di tingkat internasional.

## B. Sistem Manajemen Mutu Layanan Kekayaan Intelektual ISO 9001:2015

DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2024, setelah menjalani audit internal pada 12-13 Desember 2024. Sertifikasi ini menegaskan komitmen DJKI terhadap standar internasional dalam pengelolaan proses dan layanan publik yang berkualitas tinggi.



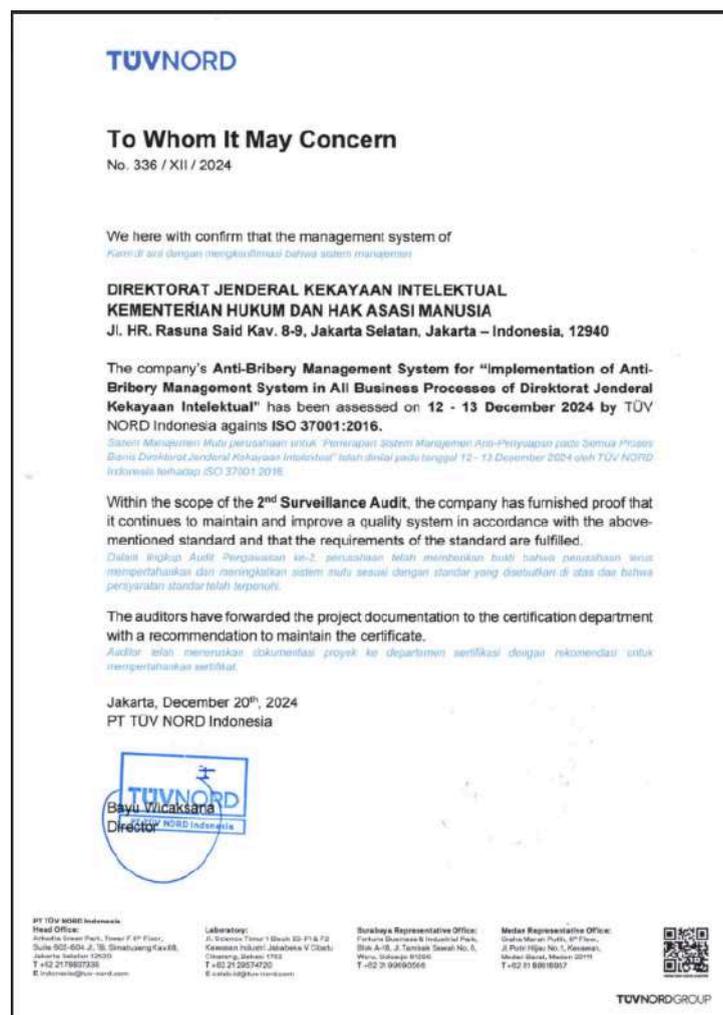
Sertifikat ISO 9001:2015 ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DJKI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan publik, serta mendukung transformasi digital yang direncanakan untuk tahun 2025. Dengan mempertahankan sertifikasi ini, DJKI menunjukkan dedikasi terhadap peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

### C. Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Layanan Kekayaan Intelektual ISO 37001:2016

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 pada akhir tahun 2024. Audit internal yang dilakukan pada tanggal 12-13 Desember 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan DJKI mendapatkan hasil *zero finding* (tidak ada temuan) untuk sertifikasi ini selama tiga tahun berturut-turut.

ISO 37001:2016 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). Melalui penerapan standar ini, DJKI berkomitmen untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus penyuapan serta memperkuat budaya antikorupsi di dalam organisasi. Selama tahun 2024, DJKI juga melaksanakan audit internal yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SMAP dan mengidentifikasi potensi celah dalam sistem yang dapat dieksploitasi untuk praktik penyuapan.

DJKI terus menunjukkan dedikasi terhadap akuntabilitas dan integritas, serta telah membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk memantau dan mengendalikan gratifikasi di lingkungan organisasi. Hal ini mencerminkan komitmen DJKI dalam menjaga pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan nepotisme.



#### D. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 27001:2022 pada akhir tahun 2024. Dalam audit internal yang dilakukan pada tanggal 12-13 Desember 2024, DJKI mendapatkan hasil zero finding, yang menunjukkan tidak adanya pelanggaran dalam proses audit.

ISO 27001:2022 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi (ISMS), yang bertujuan untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan bahwa data dikelola dengan aman. Dengan mempertahankan sertifikasi ini, DJKI menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keamanan informasi, yang sangat penting dalam mendukung layanan publik di bidang kekayaan intelektual.

Pencapaian ini merupakan bagian dari upaya DJKI untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi, serta mendukung transformasi digital yang direncanakan untuk tahun 2025.



#### TO WHOM IT MAY CONCERN

No. 2274/TSI/2/12/2024

**Subject** : Notification in the Surveillance Process

We, PT TSI Sertifikasi Internasional, hereby explains that:

**Company Name** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

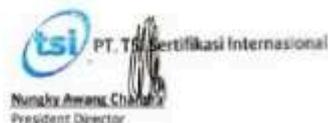
**Address** : Jl. H.R.Rasuna Said Kav 5-8, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12940

This company is already assessed for ISO 27001:2022 certification on 24 December 2024. Now the process review is being in progress and the certificate will be issued after all processes have been completed

This letter is valid for 1 (one) months from the issued date

Thank you for your attention

Yours sincerely,  
PT TSI Sertifikasi Internasional



**Nunuk Ariana, Charita**  
President Director

## E. Sistem Manajemen Layanan TI ISO 20000-1:2018

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 20000-1:2018 pada akhir tahun 2024. Dalam audit internal yang berlangsung pada 12-13 Desember 2024, DJKI mencatat hasil zero finding, menandakan tidak adanya pelanggaran yang ditemukan selama proses audit.

ISO 20000-1:2018 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen layanan TI, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan teknologi informasi yang diberikan kepada publik. Dengan mempertahankan sertifikasi ini, DJKI menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kekayaan intelektual, serta memastikan bahwa proses dan sistem manajemen layanan TI berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar internasional.

Prestasi ini juga mencerminkan upaya DJKI dalam mendukung transformasi digital dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam layanan publik, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.



### TO WHOM IT MAY CONCERN

No. 2273/TSI/2/12/2024

**Subject** : Notification in the Surveillance Process

We, PT TSI Sertifikasi Internasional, hereby explains that:

**Company Name** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

**Address** : Jl. H.R.Rasuna Said Kav 8-B,Kuningan, Sateleudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 12940

This company is already assessed for **ISO 20000-1:2018** certification on 23 December 2024. Now the process review is being in progress and the certificate will be issued after all processes have been completed.

This letter is valid for **1 (one)** months from the issued date.

Thank you for your attention.

Your sincerely,  
PT TSI Sertifikasi Internasional



**tsi** PT. TSI Sertifikasi Internasional  
Ningska Awang Chandra  
President Director

## F. GOV MEDIA AWARDS 2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil meraih penghargaan bergengsi pada acara Gov Media Awards 2024 yang diselenggarakan pada 13 Juni 2024 di Marina Bay Sands Expo & Convention Center, Singapura.

Pada ajang tersebut, DJKI mendapat penghargaan atas dua proyek inovatif yaitu Utilizing Artificial Intelligence for Intellectual Property Search Project Synopsis yang diusung oleh Analis Kekayaan Intelektual (KI) Ahli Pertama Syafril Tua dan Automation Approval Services (POP) of Intellectual Property yang diusung oleh Analis KI Ahli Muda Nugroho Irawan Febianto.

Acara GovMedia Awards 2024 ini menjadi ajang bergengsi bagi instansi pemerintah dan lembaga publik dari berbagai negara untuk memamerkan inovasi dan pencapaian mereka dalam transformasi digital dan pelayanan publik. Pengakuan yang diterima DJKI ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.



GovMedia Awards 2024 adalah sebuah penghargaan yang diselenggarakan tiap tahunnya untuk mengapresiasi keunggulan dan inovasi dalam penggunaan media oleh institusi pemerintah. Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk mengakui dan mendorong praktik terbaik dalam komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Para pemenang GovMedia Awards dipilih berdasarkan kriteria inovasi dalam penggunaan sistem, keterbukaan informasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan dampak positif yang dihasilkan.

## G. Bronze Winner - Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil meraih penghargaan di ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024. Dalam kompetisi ini, DJKI mendapatkan Bronze Winner, yang merupakan pengakuan atas kinerja komunikasi dan hubungan masyarakat yang baik.

Acara PRIA 2024 diselenggarakan dengan tema "Komunikasi yang Menginspirasi Peradaban" dan mencakup berbagai kategori, termasuk komunikasi pemerintah, manajemen krisis, dan program PR. Total terdapat 699 entri dari 219 instansi yang berpartisipasi, menunjukkan antusiasme tinggi dalam bidang hubungan masyarakat di Indonesia.

Peraih Bronze Award pada kategori "Owned Media (E-Magazine)" diberikan atas Buletin Media HKI Volume 3 Tahun V/2023.



## H. Program Inovatif untuk Negeri - Merdeka Awards 2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil meraih penghargaan di ajang Merdeka Awards 2024 yang diselenggarakan pada 19 September 2024 di Auditorium SCTV Tower.



Penghargaan ini diterima karena kontribusi DJKI dalam program-program inovatif yang telah diluncurkan, seperti Aplikasi Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK), Persetujuan Otomatisasi Pelayanan Merek (POP Merek), dan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC).

Hal ini menunjukkan komitmen DJKI untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan kekayaan intelektual. Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi dari merdeka.com atas layanan-layanan publik yang diberikan oleh Kemenkumham.

## I. INOVASI LAYANAN DJKI 2024

### 1. APLIKASI PENELITIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BERBASIS AI

#### Aplikasi Penelitian Paten Berbasis Artificial Intelligence

The screenshot displays the user interface of the 'Paten' (Patent) search application. The top navigation bar includes the logo of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and the text 'Penelusuran KI - Paten'. A user profile icon labeled 'Admin' is visible in the top right corner. The main content area features a large graphic of a DNA double helix with the word 'Paten' centered below it. A search input field contains the text 'Masukan kata kunci', and an 'Advanced Search' button is located to its right. Below this, a second screenshot shows a more detailed search interface. It includes tabs for 'Simple Search', 'Advance Search', and 'Load Saved Search'. The search input field now contains the keyword 'Batik', and a 'Cari' (Search) button is present. Below the search bar, there are four dropdown menus for filtering results: 'Tampilkan Data' (set to 10), 'Tanggal Publikasi' (set to Ascending), 'Tanggal Pendaftaran' (set to Ascending), and 'Tanggal Penerimaan' (set to Ascending). A pagination control shows 'Previous', '1', '2', '3', '4', '5', '...', '17', and 'Next'. Two buttons, 'Export' and 'Save Result', are located below the filters. At the bottom, a search result is displayed for the patent 'PENCETAKAN KAIN ATAU BATIK DUA MUKA' with ID 'FO0200600586'. The result details include: Applicant: HERMAWAN; Application Date: 2006-10-05; Publication Date: 2008-04-10; Registration Date: 2006-10-03; Status: (PA) Diberi Paten; Inventor Name: HERMAWAN; PCT: IPC: D51\* 12/06 (D06F 3/24); Publication No.: 048.1490; and Registration No.: 10P000027776.

Dashboard aplikasi penelitian paten merupakan media antarmuka berbentuk website yang dapat digunakan oleh pengguna (pemeriksa) untuk melakukan penelitian atau pencarian mengenai produk kekayaan intelektual kategori hak paten. Kekayaan intelektual kategori paten merujuk pada hak tertentu yang diberikan secara khusus kepada penemu atas penemuan baru, yang meliputi produk atau proses yang memiliki kebaruan, keterkaitan dengan aktivitas inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Hak paten memberikan pemiliknya hak untuk mencegah pihak lain tanpa izin melakukan pembuatan, penggunaan, penjualan, atau impor penemuan yang telah dipatenkan tersebut selama masa berlakunya paten.

Dashboard menyediakan akses langsung ke basis data yang luas tentang paten-paten yang telah diajukan atau telah diberikan di berbagai yurisdiksi. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci, nomor paten, nama penemu, atau topik teknis tertentu dengan cepat dan efisien. Dashboard memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis

mendalam terhadap paten-paten yang relevan dengan bidang keahlian atau industri patena. Patena dapat membandingkan paten-paten yang ada, mengidentifikasi tren teknologi, dan mengevaluasi tingkat inovasi dalam suatu domain tertentu. Pengguna dapat menggunakan dashboard untuk memantau aktivitas paten pesaing atau perusahaan lain dalam industri patena. Ini dapat memberikan wawasan berharga tentang strategi inovasi kompetitor, serta membantu dalam pengembangan strategi perlindungan.

## Penelusuran Merek Berbasis Berbasis Artificial Intelligence

The image shows two screenshots of a web application for trademark search. The top screenshot is the landing page, featuring a large 'Merek' title and a search bar. The bottom screenshot shows the search results for the keyword 'Batik'. The search form includes fields for phonetic input, date selection, class selection, and status selection. The results are displayed as a grid of cards, each showing the word 'BATIK' and a unique identification number.

Search Result	ID	Class
BATIK	D002009038152	BATIK   16
BATIK	D002010006457	BATIK   16
BATIK	D002010037219	BATIK   30
BATIK	D002011004168	BATIK   32
BATIK	D002011004173	BATIK   33
BATIK	D002011009405	BATIK   28
BATIK	D002011033368	BATIK   16

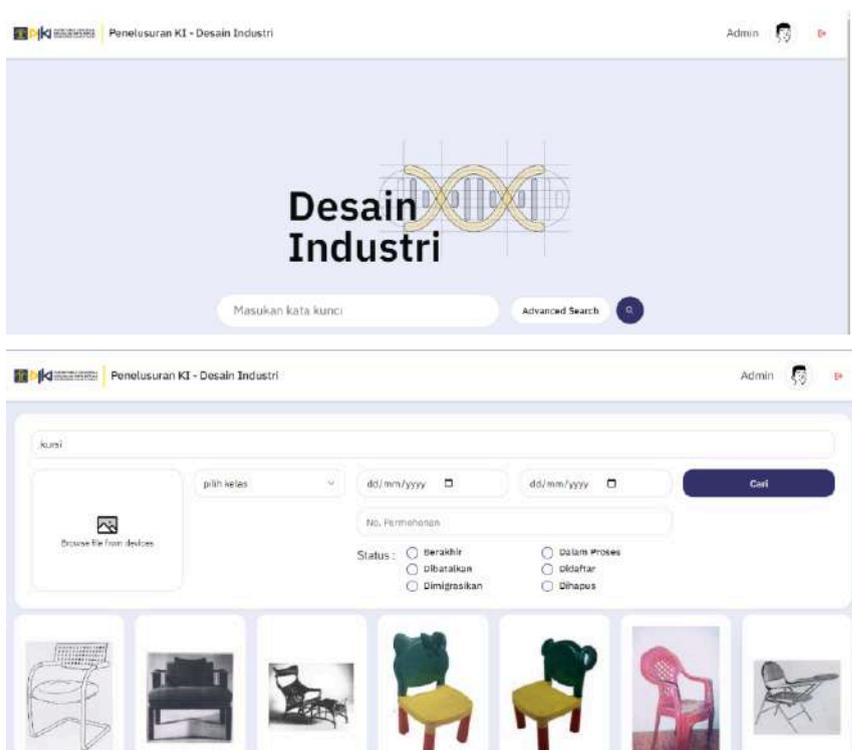
Dashboard aplikasi penelusuran merek merupakan media antarmuka berbentuk website yang dapat digunakan oleh pengguna (pemeriksa) untuk melakukan penelusuran atau pencarian mengenai produk kekayaan intelektual kategori merek. Kekayaan intelektual kategori merek mencakup hak-hak legal yang diberikan kepada pemilik merek terhadap penggunaan dan perlindungan identitas bisnis mereka. Ini termasuk hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tertentu dalam perdagangan, serta hak untuk mencegah pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Perlindungan merek memainkan peran penting dalam melindungi reputasi dan nilai komersial suatu bisnis, serta memastikan konsumen dapat mengidentifikasi

produk atau layanan dengan mudah. Dalam konteks hukum dan bisnis, kekayaan intelektual kategori merek meliputi penciptaan, pengelolaan, dan perlindungan merek dagang untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan disediakannya aplikasi penelusuran merek, pengguna dapat melihat apakah merek yang ingin didaftarkan sudah tertera pada sistem. Selain itu dengan detail informasi yang disajikan pengguna dapat melihat inovasi dan perbedaan pada merek yang akan didaftarkan dan yang sudah terdaftar. Dashboard ini menyediakan akses mudah dan cepat ke informasi terkini tentang merek dagang yang terdaftar dan aplikasi yang sedang diproses di berbagai yurisdiksi. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran menyeluruh atas nama-nama merek tertentu atau kategori tertentu, membantu mereka dalam pengambilan keputusan strategis terkait perlindungan merek dan mitigasi risiko hukum.

Dashboard penelusuran memfasilitasi analisis komprehensif terhadap tren dan pola pendaftaran merek di pasar global, memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap aktivitas pesaing atau tren industri tertentu. Informasi ini sangat berharga bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan ekspansi internasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor perlindungan merek. Selain itu, dashboard pencarian merek juga dapat menyediakan laporan statistik dan data historis yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, termasuk evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan merek dan estimasi nilai merek dagang dalam konteks penilaian bisnis atau transaksi *mergers and acquisitions*.

## Penelusuran Desain Industri Berbasis Artificial Intelligence



Dashboard aplikasi penelusuran kekayaan intelektual (KI) berbasis artificial intelligence (AI) kategori desain industri merupakan media antarmuka berbentuk website yang dapat digunakan oleh pengguna (pemeriksa) untuk melakukan penelusuran atau pencarian mengenai produk kekayaan intelektual kategori desain industri. Kekayaan intelektual kategori desain industri mencakup hak kekayaan intelektual yang melindungi bentuk, konfigurasi, atau ornamen yang memberi tampilan khas pada produk industri. Desain industri adalah bentuk dari suatu produk yang memberikan tampilan visual unik dan estetik pada barang tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan hak desain industri, desain harus didaftarkan secara resmi ke badan pendaftaran hak kekayaan intelektual di Indonesia. Maka dari itu, dashboard penelusuran berbasis AI untuk modul desain industri ini akan menyajikan data desain industri yang sudah melalui proses pendaftaran.

Dengan disediakannya aplikasi penelusuran desain industri, pengguna dapat melihat apakah desain industri yang ingin didaftarkan sudah tertera pada sistem. Selain itu dengan detail informasi yang disajikan pengguna dapat melihat inovasi dan perbedaan pada desain industri yang akan didaftarkan dan yang sudah terdaftar. Dashboard ini menyediakan akses mudah dan cepat ke informasi terkini tentang desain industri yang terdaftar dan aplikasi yang sedang diproses di berbagai yurisdiksi. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran menyeluruh atas elemen-elemen desain industri tertentu, membantu pelisting desain industri dalam pengambilan keputusan strategis terkait perlindungan desain industri dan mitigasi risiko hukum.

Dashboard penelusuran memfasilitasi analisis komprehensif terhadap tren dan pola pendaftaran desain industri di pasar global, memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap aktivitas pesaing atau tren industri tertentu. Informasi ini sangat berharga bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan ekspansi internasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor perlindungan desain industri. Dashboard penelusuran KI berbasis AI untuk kategori desain industri kekayaan intelektual biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang relevan dan melakukan analisis mendalam. Fitur utama pada dashboard penelusuran tentunya adalah form pencarian untuk kekayaan intelektual desain industri. Pada aplikasi dashboard penelusuran produk kekayaan intelektual kategori desain industri akan disediakan dua metode penelusuran menggunakan kata kunci atau menggunakan gambar.

## 2. Intellectual Property Academy (IP Academy)



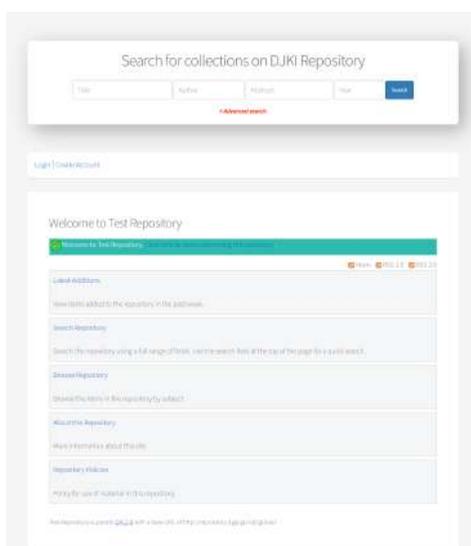
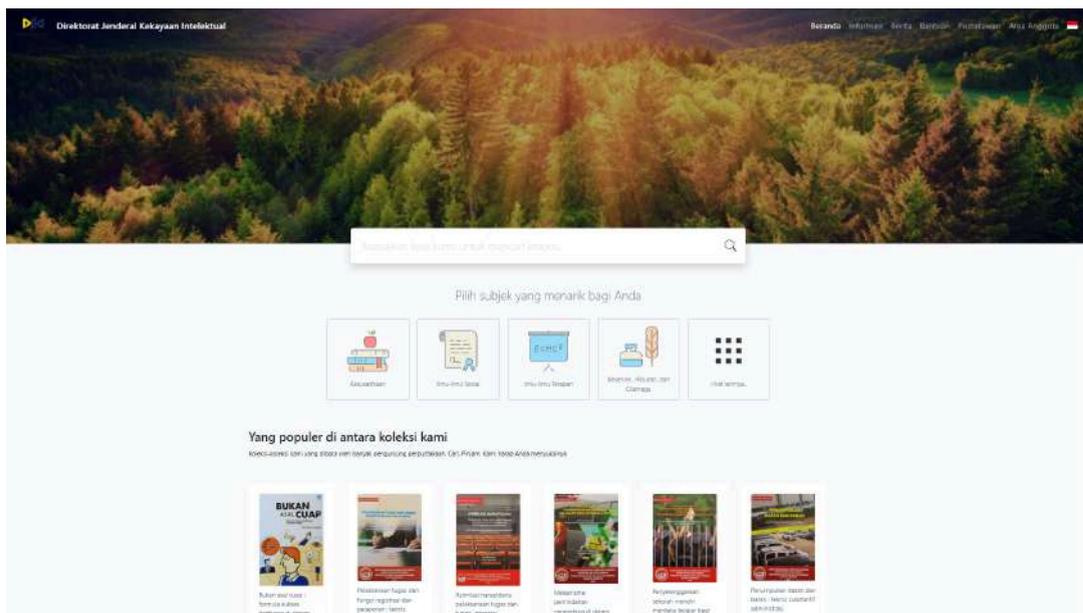
Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia adalah lembaga edukasi non-formal yang berorientasi pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang kekayaan intelektual bagi masyarakat umum. Adapun kelompok masyarakat yang menjadi prioritas utamanya adalah yang berasal dari kalangan profesional, pelaku bisnis, peneliti, dosen, inventor, pendesain, dan pelaku seni, termasuk yang berasal dari generasi muda.

Indonesian Intellectual Property Academy (IIPA) atau Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia adalah lembaga edukasi non-formal yang berorientasi pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang kekayaan intelektual bagi masyarakat umum. Adapun kelompok masyarakat yang menjadi prioritas utamanya adalah yang berasal dari kalangan profesional, pelaku bisnis, peneliti, dosen, inventor, pendesain, dan pelaku seni, termasuk yang berasal dari generasi muda (<https://ekii.dgip.go.id/>).

Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia merupakan hasil implementasi dari perjanjian kerja sama antara DJKI dan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang ditandatangani pada 7 Juli 2023 di Jenewa, Swiss. Perjanjian ini dapat terlaksana berkat inisiasi dan dorongan dari Menkumham. Pembentukan IIPA diharapkan dapat mendukung DJKI dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI). Hal ini diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan jumlah permohonan serta komersialisasi KI oleh masyarakat.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan prioritas berkaitan dengan IIPA yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang KI, baik bagi masyarakat maupun bagi para pegawai di lingkungan DJKI. Pertama adalah pemberian edukasi KI dasar bagi 410 orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan DJKI; kedua, edukasi KI dasar bagi mitra hukum DJKI; ketiga, edukasi patent drafting bagi para dosen/peneliti; dan terakhir adalah edukasi KI bagi Customer Service DJKI yang merupakan garda terdepan untuk layanan konsultasi dan pengaduan KI.

### 3. Perpustakaan dan Repository DJKI



Demi mendukung EKII (Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia), DJKI melakukan transformasi digital perpustakaan melalui fitur repositori (<https://perpus.dgip.go.id/>). Dalam era digital saat ini, repositori menjadi salah satu wadah yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi para penggunanya. Repositori sendiri merupakan tempat penyimpanan atau pelestarian informasi digital secara online yang bertujuan mengumpulkan, melestarikan, dan menyebarkan karya ilmiah dari sebuah lembaga.

DJKI sendiri terus berupaya untuk melakukan transformasi perpustakaan KI untuk mengacu pada perubahan perpustakaan dari hanya sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman koleksi buku menjadi pusat informasi pengetahuan, pembelajaran dan komunitas yang lebih dinamis.

Repositori sendiri (<http://repository.dgip.go.id/>) bisa berisi publikasi ilmiah berbentuk jurnal/majalah, makalah prosiding, buku, laporan penelitian, dokumen rekomendasi, makalah kebijakan, program penelitian dan pengkajian, atau pengembangan serta hasil karya ilmiah yang dihasilkan institusi. Repositori dapat dijadikan strategi atau cara untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dalam hal ini yaitu kemudahan mengakses berbagai informasi dengan cepat, tepat dan akurat serta dapat memberikan dampak positif bagi institusi.

## 4. IP Marketplace

**Lebih Mudah Memasarkan KI**

Platform yang mendukung dan menghubungkan karya-karya brilian dengan pasar yang tepat. Mari bersama memperluas jangkauan dan dampak dari setiap inovasi.

1.000+ Pengguna

10.000+ Pemilik KI

**Pilih Kategori KI**

- Merek**  
Terdapat 1 produk
- Patent**  
Terdapat 41 produk
- Desain Industri**  
Terdapat 2 produk
- Indikasi Geografis**  
Terdapat 0 produk

**Produk KI Terbaru**

Semua Produk | Merek | Patent | Desain Industri | Indikasi Geografis

- Design Geometri Makro Bur Implan Gigi Manusia**  
KAWASAN SAINS TEKNOLOGI DAN HILIRISASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
- Alat Pendeteksi Jamur Pada Naskah Kuno**  
KAWASAN SAINS TEKNOLOGI DAN HILIRISASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
- Fermentasi Campuran Susu Sapi Kedele Dan Kacang Hijau...**  
KAWASAN SAINS TEKNOLOGI DAN HILIRISASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
- METODE DAN FORMULASI ASAM SITRAT DARI SARI BUA...**  
KAWASAN SAINS TEKNOLOGI DAN HILIRISASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

IP Marketplace (<https://marketplace.dgip.go.id/>) merupakan aplikasi untuk para pelaku usaha dan pemilik Kekayaan Intelektual yang digunakan untuk memanfaatkan Kekayaan Intelektual guna mendorong karya dan inovasi yang dimiliki semakin bernilai. Sistem terintegrasi ini dirancang untuk memudahkan pencarian dan koneksi antara pemilik Kekayaan Intelektual sehingga terbuka kesempatan untuk kolaborasi bisnis seperti pengalihan hak, lisensi, Royalti atau bentuk kolaborasi bisnis lainnya.

IP Marketplace ini dapat diakses tanpa mengeluarkan biaya, kapanpun dan dimanapun. Informasi dapat didaftarkan secara langsung oleh pemilik Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak terlibat langsung dalam negosiasi perizinan.

## NILAI KINERJA DJKI 2024

### A. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bagian dari upaya untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia. Survey ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang objektif dan komprehensif dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait pelayanan DJKI, serta untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DJKI dalam menjalankan fungsinya.

Metodologi Survey: Survey ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana responden yang terlibat meliputi masyarakat umum, pelaku usaha, praktisi hukum, serta pihak lain yang berinteraksi dengan DJKI. Metode pengumpulan data akan meliputi:

1. Kuesioner online yang akan disebarakan kepada masyarakat melalui berbagai platform digital yang dimiliki oleh DJKI.
2. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan lebih mendalam terkait kualitas layanan DJKI.
3. Focus group discussion untuk memperoleh feedback langsung dari berbagai kelompok terkait pelayanan DJKI.

Indikator Pengukuran: Survey ini akan mengukur beberapa aspek pelayanan DJKI, seperti:

1. Aksesibilitas: Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan DJKI.
2. Kualitas Pelayanan: Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan terkait pengurusan HKI.
3. Transparansi: Tingkat keterbukaan DJKI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
4. Kemudahan Proses Administrasi: Prosedur yang jelas dan mudah dipahami dalam setiap tahapan layanan.
5. Kepuasan Umum: Tingkat kepuasan secara keseluruhan terhadap layanan DJKI.

Pelaksanaan dan Analisis Hasil: Survey ini akan dilakukan secara bertahap, dengan pengumpulan data di berbagai platform, serta analisis terhadap hasil survei yang diperoleh. Tim yang ditunjuk akan mengolah data untuk menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggambarkan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil survei ini akan digunakan untuk menyusun laporan evaluasi pelayanan, yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan inovasi di masa depan.

Komitmen DJKI: DJKI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan hasil survey ini, serta memberikan respons yang lebih baik terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Survey ini juga merupakan

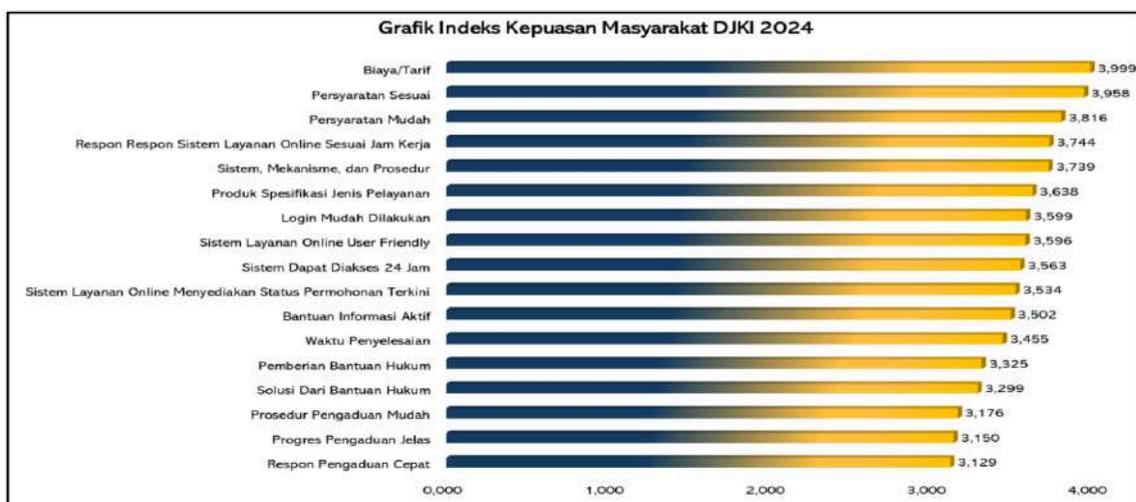
bagian dari upaya DJKI untuk mencapai good governance dengan menyediakan layanan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap masyarakat.

Dengan pelaksanaan survey ini, diharapkan DJKI dapat terus memperbaiki pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia, demi kemajuan ekonomi kreatif dan inovasi nasional.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kekayaan Intelektual	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	3.29	3.39	3.46	3.53	3.54

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kekayaan Intelektual pada Setiap Unsurnya. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Secara umum, tingkat kepuasan berada pada kategori sangat baik, dengan skor berkisar antara 3,129 hingga 3,999 dari skala 4,0. Dari berbagai indikator yang dinilai, aspek Biaya/Tarif menempati posisi tertinggi dengan skor 3,999. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat merasa biaya layanan yang dikenakan sangat wajar, transparan, dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

Namun demikian, survei ini juga menyoroti sejumlah aspek yang masih menjadi titik lemah. Unsur dengan skor terendah adalah Respon Pengaduan Cepat dengan nilai 3,129, disusul oleh Progres Pengaduan Jelas (3,150) dan Prosedur Pengaduan Mudah (3,176). Kondisi ini menandakan bahwa mekanisme penanganan pengaduan masih belum optimal, baik dari sisi kecepatan, transparansi, maupun kemudahan prosedur. Selain itu, indikator terkait pemberian bantuan hukum (3,325) dan solusi yang diberikan (3,299) juga menunjukkan perlunya peningkatan agar layanan DJKI dapat lebih responsif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat.



## B. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat penting dalam pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah di Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Capaian Kinerja SAKIP DJKI hingga pada tahun 2024 menunjukkan progres perbaikan yang positif.

Tahun/ Unsur SAKIP	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	22,54	22,79	25,50	24,00	23,70
Pengukuran Kinerja	22,40	22,40	27,00	27,00	27,00
Pelaporan Kinerja	13,27	13,00	21,85	13,05	10,50
Evaluasi Kinerja	8,00	8,31	20,00	22,50	20,00
Capaian Kinerja	14,92	15,33			
Total	81,12	81,83	84,35	86,55	81,2
Predikat	A	A	A	A	A

Penilaian SAKIP pada tahun 2024 mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh adanya proses revisi rencana strategis 2020-2024 yang masih berlangsung pada saat penilaian. Namun demikian, DJKI dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP, melakukan upaya-upaya yang relevan diantaranya :

1. Program Inovatif: DJKI merencanakan program-program unggulan seperti "Intellectual Property (IP) Goes To Campus & Industry" dan "Mobile Intellectual Property Clinic" untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan kekayaan intelektual dan mendorong inovasi.
2. Reviu Rencana Strategis: Dalam upaya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terkini, DJKI melakukan reviu atas Rencana Strategis (Renstra) yang ada untuk memastikan relevansi dan efektivitas program-program yang dijalankan, termasuk pada tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir periode pemerintah 2020-2024 perlu dilakukan reviu pelaksanaan Renstra DJKI 2020-2024 untuk menyusun Renstra 2025-2029 berikutnya. Pada tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan di Bandung pada bulan Februari 2024.
3. Penggunaan Teknologi Informasi: Penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi seperti Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual (SAKI) bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan permohonan paten dan mengoptimalkan sistem informasi kinerja di DJKI. penggunaan sistem informasi teknologi pada pelayanan publik mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan maupun pelaksanaan kegiatan administratif organisasi pemerintah.

### C. Pelaksanaan SPIP, IEPK, MRI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI terus memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja. SPIP dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, transparan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Penguatan SPIP di DJKI tidak hanya meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. Dengan indeks pelayanan publik (IPK) mencapai 4,000 pada 2024, DJKI berkomitmen memastikan layanan kekayaan intelektual (seperti pendaftaran merek, paten, dan hak cipta) semakin cepat, transparan, dan sesuai standar internasional.

Upaya DJKI dalam meningkatkan maturitas SPIP mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Melalui kolaborasi antar instansi dan inovasi berbasis teknologi, DJKI terus menjadi garda terdepan dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

<b>Capaian</b>	<b>Nilai</b>
SPIP	4,729 (skala 5)
IPK	4 (skala 5)
MR	4,802 (skala 5)

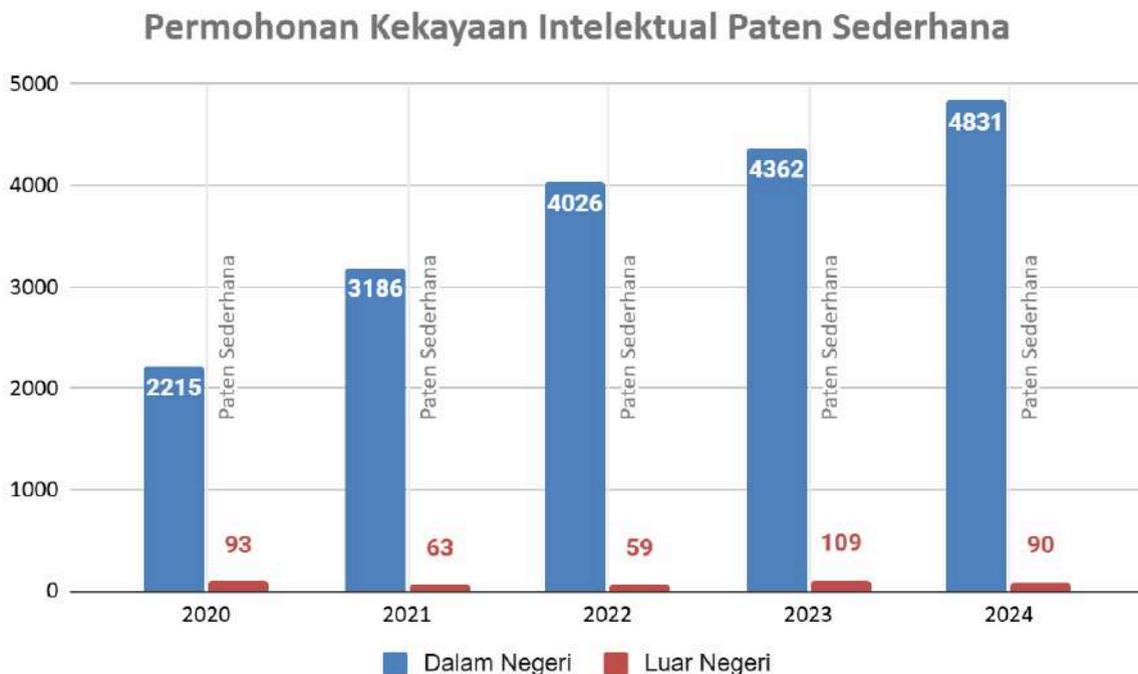
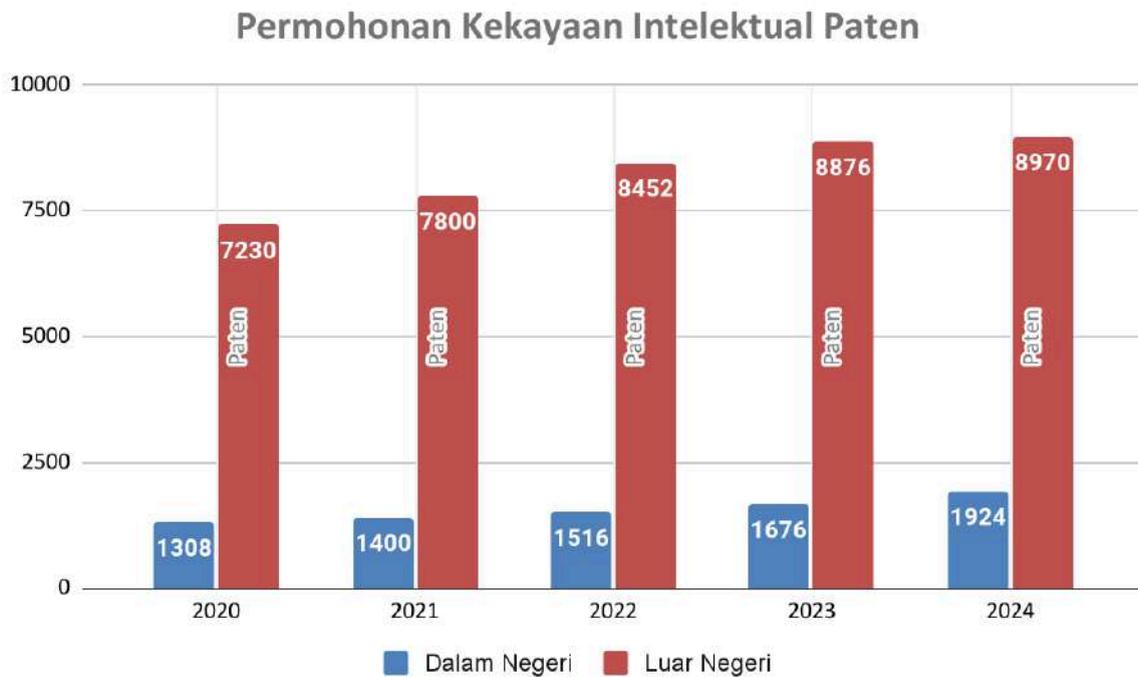
## KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DALAM ANGKA

### A. Permohonan Kekayaan Intelektual

(buatkan grafik permohonan LN & DN, UMKM & UMUM, Tren 10 permohonan per negara 5 tahun, Tren kelas permohonan 5 tahun)

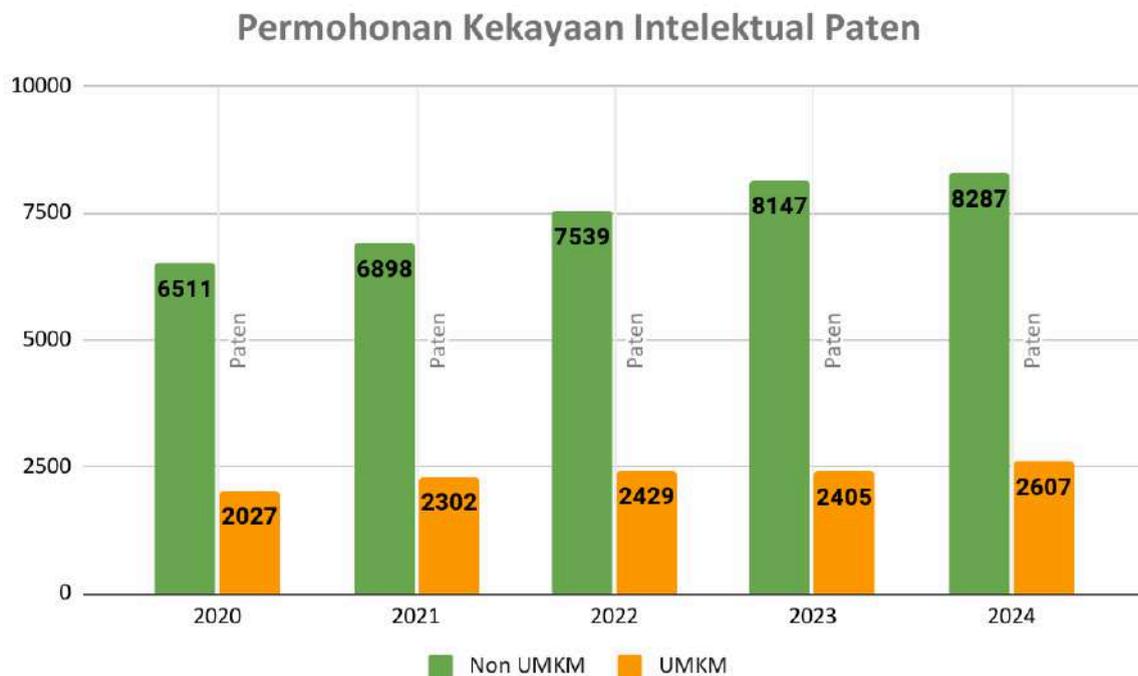
#### 1. Permohonan Paten

Permohonan Paten Dalam Negeri dan Luar Negeri

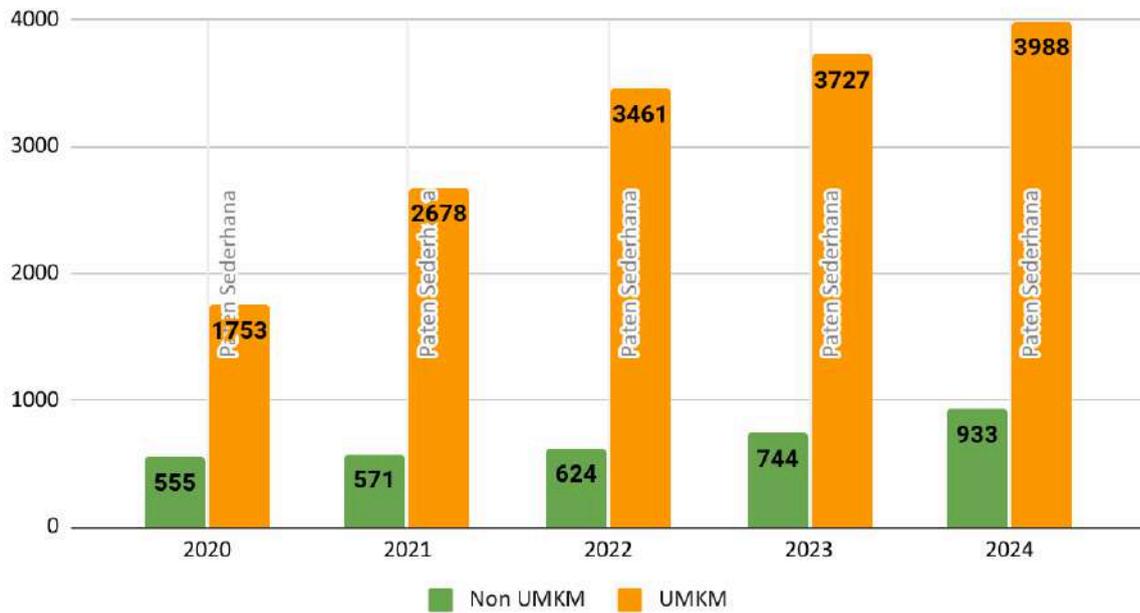


Permohonan paten dari dalam negeri untuk di Indonesia masih relatif rendah (rata-rata 15,9% sejak tahun 2020) dibandingkan dengan seluruh permohonan paten. Permohonan paten dari luar negeri di Indonesia saat ini didominasi dari Jepang, USA, dan China. Selain itu Korea Selatan menunjukkan pola konsisten yang diperkirakan akan naik signifikan di tahun 2025 mendatang. Kelas Paten yang diajukan di Indonesia saat ini terutama di *human necessities* dan *chemistry, metallurgy*.

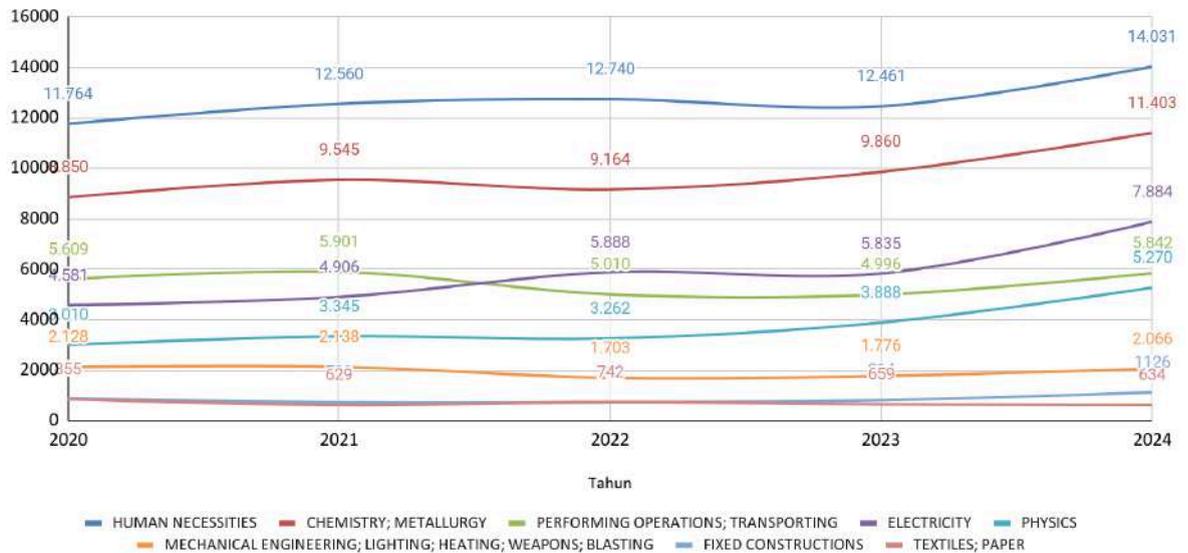
Permohonan Paten UMKM dan Umum



## Permohonan Kekayaan Intelektual Paten Sederhana



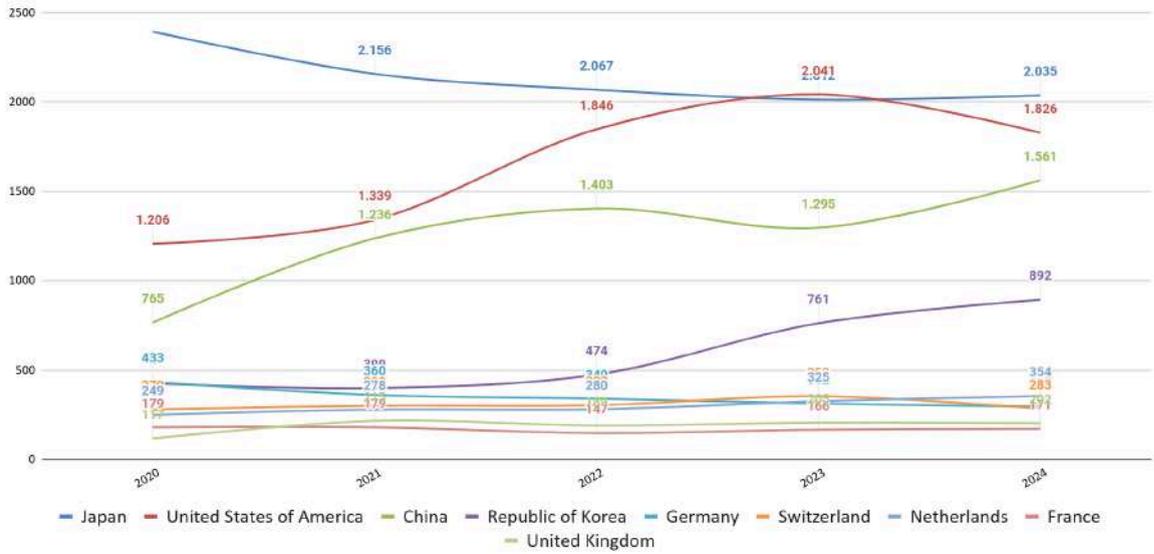
## TREN KELAS PERMOHONAN PATEN



### Tren Kelas Permohonan Paten

10 Negara Pemohon Paten Terbanyak dari Luar Negeri

### 10 Negara Pemohon Paten Terbanyak dari Luar Negeri



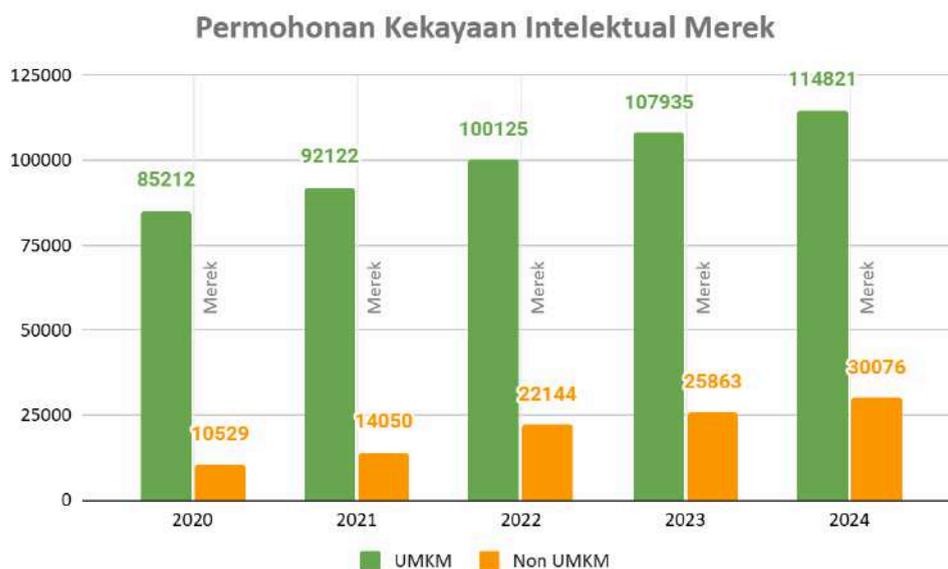
## 2. Permohonan Merek

### Permohonan Merek Dalam Negeri dan Luar Negeri

#### Permohonan Kekayaan Intelektual Merek



## Permohonan Merek UMKM dan Umum



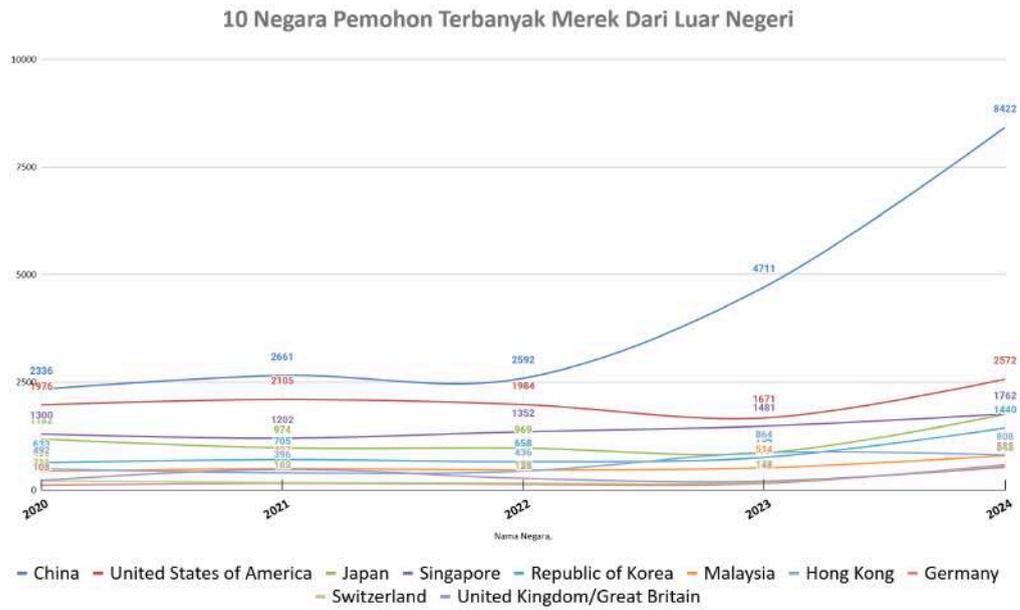
Permohonan Merek yang diajukan untuk dilindungi di Indonesia secara umum banyak berasal dari dalam negeri. Sejak tahun 2022, permohonan Merek dalam negeri konsisten di atas 100.000 permohonan, yang selaras dengan jumlah pemohon UMKM yang terus naik (9,50% dari permohonan dalam negeri tahun 2023 dan 7,63% di tahun 2024).

## Tren Kelas Permohonan Merek Indonesia



Permohonan merek di Indonesia menggunakan *nice classification* dalam pengajuan permohonannya (terdapat 45 kelas barang dan jasa). Dari data DJKI menunjukkan sejak adanya pandemi COVID-19, permohonan merek kelas 30, kelas 25, dan kelas 3 secara konsisten dengan tren naik. Sementara itu kelas 29 stagnan pada tahun 2020 - 2021, namun secara bertahap naik sampai tahun 2024.

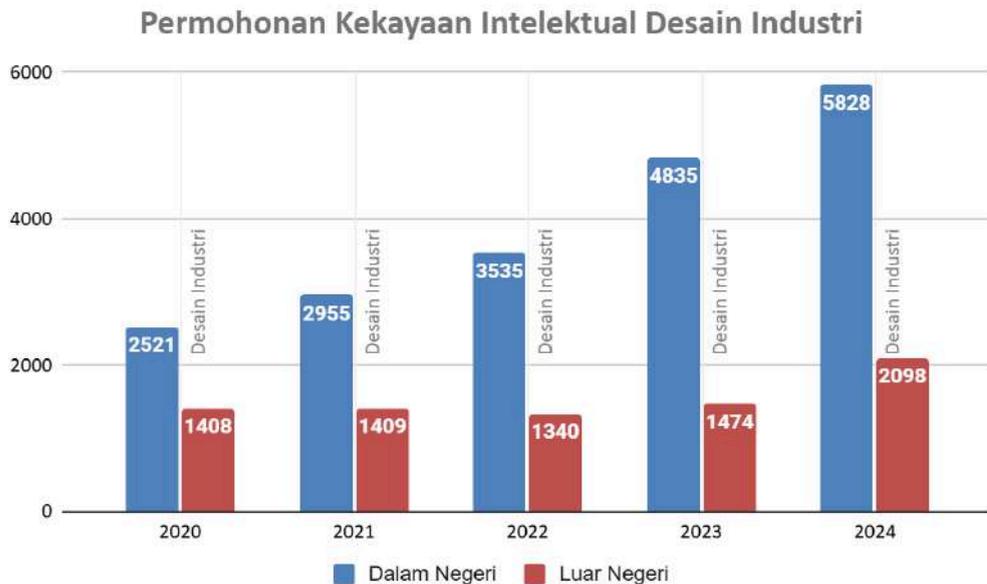
## 10 Negara Pemohon Merek Terbanyak dari Luar Negeri



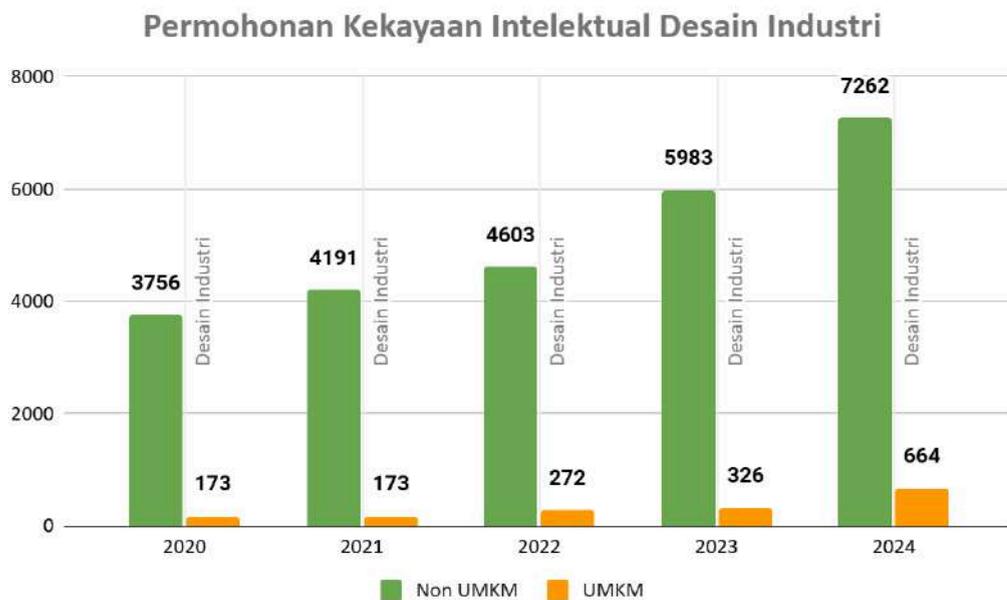
Permohonan merek di atas kami sajikan untuk 10 Negara dengan permohonan terbanyak terhitung sejak tahun 2020. Permohonan merek dari China naik secara signifikan di tahun 2024 (78,77% dibanding tahun 2023), kemudian kenaikan permohonan merek secara konsisten juga terlihat dari permohonan Singapura dan Korea Selatan. Selain itu terlihat adanya penurunan lalu kenaikan yang konsisten untuk permohonan dari USA dan Jepang sejak tahun 2020.

### 3. Permohonan Desain Industri

#### Permohonan Desain Industri Dalam Negeri dan Luar Negeri



#### Permohonan Desain Industri UMKM dan Umum



Permohonan Desain Industri pada tahun 2024 khususnya dari dalam negeri naik sebesar 20,53% dibandingkan tahun 2023, dengan pemohon utamanya dari Non-UMKM. Pada tahun 2024, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri melaksanakan kegiatan pendampingan untuk permohonan Desain Industri, khususnya di beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan hasil permohonan DI dalam negeri meningkat.

Jenis permohonan desain industri di Indonesia menggunakan *locarno classification* untuk mengkategorisasi jenis-jenis permohonan desain

industri. Dari data permohonan sejak tahun 2020, permohonan desain industri didominasi oleh klaim kelas pemohon terkait parts, perlengkapan/ sparepart/ aksesoris kendaraan (*Parts, equipment and accessories for vehicles, not included in other classes or subclasses*). Kemudian sejak tahun 2020 terdapat kenaikan klaim pada 3 kelas permohonan :

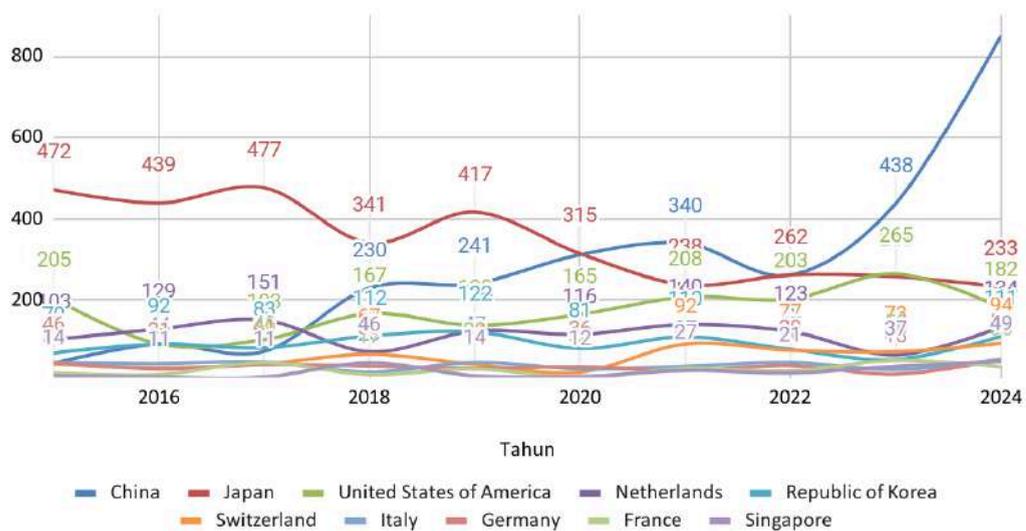
- Desain kain tekstil, tenunan, rajutan atau yang diproduksi dengan cara lain, terpal, kain kempa dan loden. (*Textile fabrics*)
- Desain kotak, peti, wadah, tempat penyimpanan, kaleng atau kaleng pengawet, kontainer barang (*Boxes, cases, containers, (preserve) tins or cans*)
- Desain semua kursi meskipun cocok untuk berbaring, seperti bangku, sofa, divan, sandaran, bangku untuk sauna dan sofa (*Seats*)

Kemudian permohonan desain industri dari luar negeri didominasi oleh 3 negara yaitu China, Jepang, dan USA. China mulai tahun 2020 mengungguli permohonan dari Jepang hingga sekarang dengan kenaikan yang signifikan. Sementara itu untuk permohonan desain industri dari Jepang konsisten turun.

#### Tren Kelas Permohonan Desain Industri Indonesia

#### 10 Negara Pemohon Desain Industri Terbanyak dari Luar Negeri

10 Negara Pemohon Desain Industri Terbanyak dari Luar Negeri

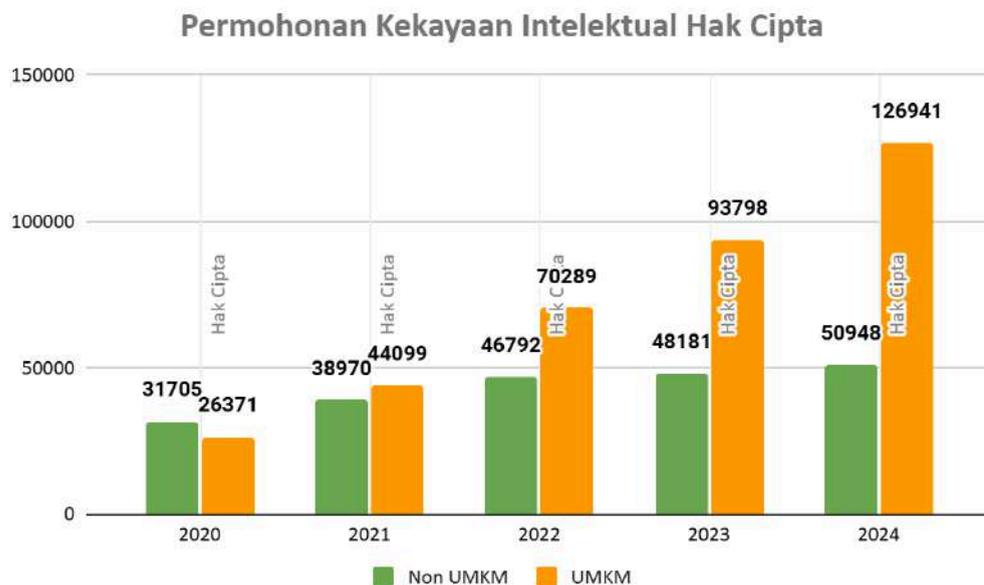


#### 4. Permohonan Hak Cipta

##### Permohonan Hak Cipta Dalam Negeri dan Luar Negeri



##### Permohonan Hak Cipta UMKM dan Umum



Permohonan Hak Cipta sejak tahun 2022 telah konsisten diatas 100.000 permohonan dalam negeri, selain itu pemanfaatan permohonan melalui jalur UMKM telah banyak dimanfaatkan baik dari akademisi maupun dari UMKM sendiri. Permohonan Hak Cipta berdasarkan provinsi berkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

##### Permohonan Hak Cipta Per Provinsi

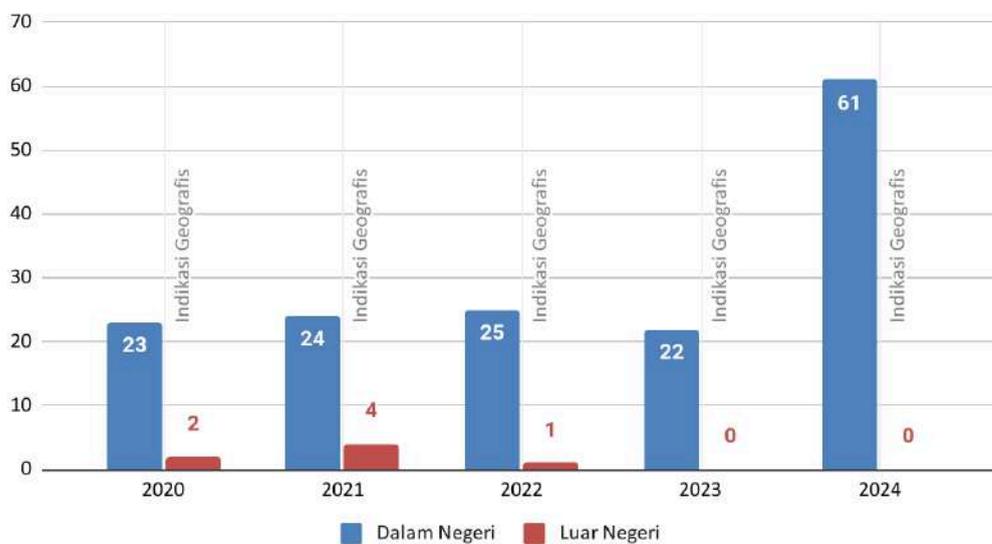
### PERMOHONAN HAK CIPTA PER PROVINSI



### 5. Permohonan Indikasi Geografis

Permohonan Indikasi Geografis Dalam Negeri dan Luar Negeri

#### Permohonan Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis



Permohonan Indikasi Geografis Per Provinsi

### Permohonan Indikasi Geografis Per Provinsi



Permohonan Indikasi Geografis dalam negeri ada peningkatan sebanyak 117,27% dari tahun 2023 sampai 2024. Tahun 2024 juga dijadikan sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis. Selama 5 tahun terakhir, provinsi Jawa Tengah menjadi permohonan Indikasi Geografis terbanyak. Pada tahun 2024 juga sudah terdapat sebanyak 44 Indikasi Geografis terdaftar.

## 6. Permohonan HKI Lainnya

### Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal



## 7. Top 10 Pemohon Permohonan Kekayaan Intelektual

Jenis	Nama Pemohon Keseluruhan (Dalam Negeri + Luar Negeri)	Jumlah	Nama Pemohon Dalam Negeri	Jumlah
<b>Merek</b>	HOSIANTA	377	HOSIANTA	377
	PT FORISA NUSAPERSADA	238	PT FORISA NUSAPERSADA	238
	IJEK WIDYAKRISNADI	234	IJEK WIDYAKRISNADI	234
	PT. BOGAMULIA NAGADI	181	PT. BOGAMULIA NAGADI	181
	PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.	164	PT BANK DANAMON INDONESIA TBK.	164
	PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION	162	PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION	162
	PT WINGS SURYA	154	PT WINGS SURYA	154
	HARDWOOD PTE LTD	145	PT KALIBIRU GRAHA ABADI	133
	PT KALIBIRU GRAHA ABADI	133	PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)	125
	TARGET BRANDS, INC.	132	PT. BINA KARYA PRIMA	123
<b>Desain Industri</b>	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	388	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	388
	UNIVERSITAS TELKOM	243	UNIVERSITAS TELKOM	243
	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	238	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	218
	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	218	PT FORISA NUSAPERSADA	216
	PT FORISA NUSAPERSADA	216	INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA	214
	INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA	214	HUIDY SUTANTO	185
	HUIDY SUTANTO	185	ADI SUTANTO	162

Jenis	Nama Pemohon Keseluruhan (Dalam Negeri + Luar Negeri)	Jumlah	Nama Pemohon Dalam Negeri	Jumlah
	ADI SUTANTO	162	LPPM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	160
	LPPM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	160	PT DTECH INOVASI INDONESIA	158
	PT DTECH INOVASI INDONESIA	158	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	109
<b>Hak Cipta</b>	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	4.012	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	4.012
	LPPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	2.999	LPPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	2.999
	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	2.740	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	2.740
	LPPM - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	2.347	LPPM - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	2.347
	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2.046	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2.046
	UNIVERSITAS INDONESIA	1.614	UNIVERSITAS INDONESIA	1.614
	UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG	1.561	UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG	1.561
	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	1.544	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	1.544
	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	1.289	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	1.289
	UNIVERSITAS AIRLANGGA	1.282	UNIVERSITAS AIRLANGGA	1.282
<b>Paten Sederhana</b>	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	255	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	255
	UNIVERSITAS DIPONEGORO	168	UNIVERSITAS DIPONEGORO	168
	DIREKTORAT INOVASI DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	137	DIREKTORAT INOVASI DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	137
	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	133	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	133
	SENTRA KI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	111	SENTRA KI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	111
	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	93	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	93
	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	92	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	92
	INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)	88	INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)	88
	LEMBAGA INOVASI PENULISAN ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL-UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	88	LEMBAGA INOVASI PENULISAN ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL-UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	88
LPPM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	75	LPPM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN	75	
<b>Paten</b>	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	859	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	859

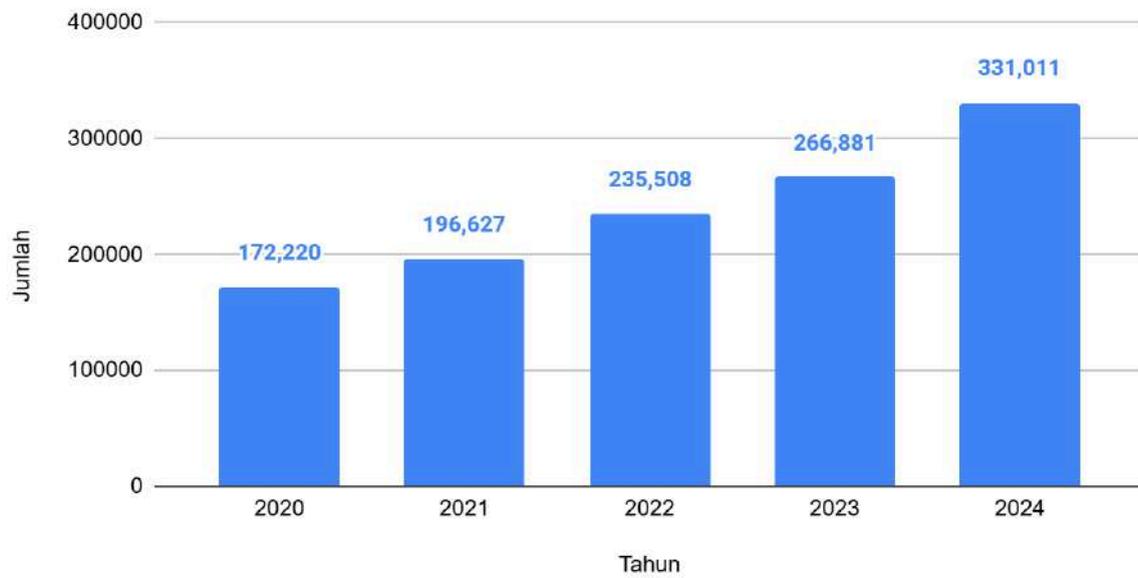
<b>Jenis</b>	<b>Nama Pemohon Keseluruhan (Dalam Negeri + Luar Negeri)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nama Pemohon Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah</b>
	QUALCOMM INCORPORATED	540	UNIVERSITAS GADJAH MADA	65
	LG ENERGY SOLUTION, LTD.	247	PT ESG NEW ENERGY MATERIAL	53
	UNILEVER IP HOLDINGS B.V.	169	INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)	51
	JFE STEEL CORPORATION	157	UNIVERSITAS AIRLANGGA	49
	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.	147	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	44
	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	146	PT GREEN ECO NICKEL	42
	BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.	142	LPPM - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	39
	NOKIA TECHNOLOGIES OY	137	PT PURA BARUTAMA	31
	INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC.	129	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	22

## B. Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual



Tahun	Merek	Paten	Desain Industri	Hak Cipta	IG	DTLST	RD	KIK	TOTAL
2020	95,742	10,846	3,967	58,076	25	11	0	951	169,618
2021	106,171	12,449	4,364	83,070	28	3	0	911	206,996
2022	122,271	14,053	4,874	117,084	26	1	0	904	259,213
2023	135,583	15,023	6,326	141,999	22	6	7	972	299,938
2024	144,657	15,815	7,926	177,889	62	10	37	942	347,338

## CAPAIAN PENYELESAIAN PERMOHONAN TAHUN 2020 - 2024



	Merek	Paten	Desain Industri	Hak Cipta	KIK	TOTAL
<b>Permohonan</b>	144,657	15,815	7,926	177,889	942	347,229
<b>Penyelesaian</b>	131,668	14,819	6,046	177,889	589	331,011

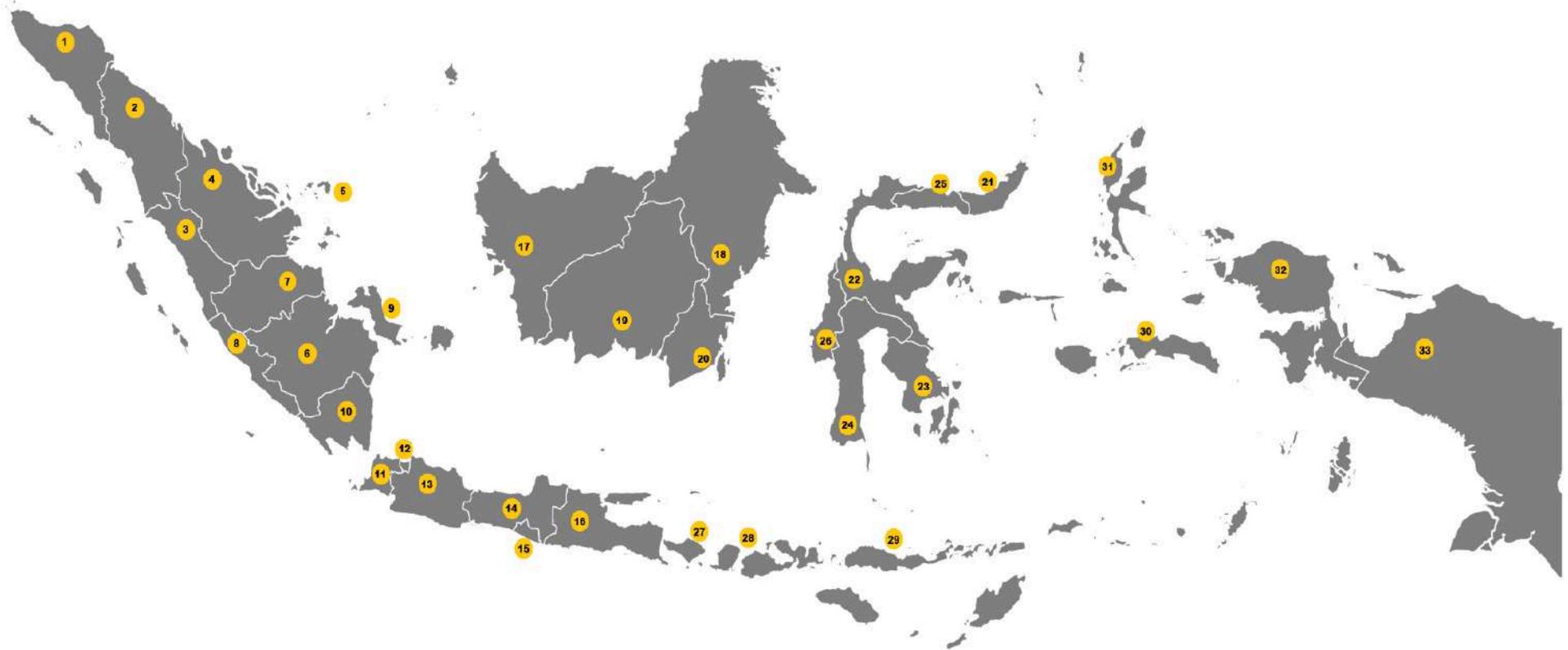
### C. Kekayaan Intelektual Indonesia

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memiliki mekanisme perlindungan dan jangka waktu perlindungan yang berbeda. Produk Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dilindungi ada beberapa jenis, yaitu:

Differentiator	Hak Cipta	Desain Industri	DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Rahasia Dagang	Paten	Merek	Perlindungan Varietas Tanaman
Dasar Hukum	UU No 28 Tahun 2014	UU No 31 Tahun 2000	UU No 32 Tahun 2000	UU No 30 Tahun 2000	UU No 13 Tahun 2016 jo. UU No 65 Tahun 2024	UU No 20 Tahun 2016	UU No 29 Tahun 2000
Subjek Hukum	Pencipta, Pemilik Hak Terkait	Designer	Designer of ICLD	Pemilik Rahasia Dagang	Inventor	Pemilik Merek	Plant Breeder
Objek yang dilindungi	Seni, Literatur, Program IT/Aplikasi, Hak terkait	Desain Produk yang memiliki estetika dan fungsi	<i>Lay-out Design in IC</i>	Rahasia Informasi Bisnis/Usaha/ Resep	Invensi dalam bentuk produk dan proses	Simbol Logo 2D dan 3D, suara dan hologram (barang dan jasa)	Varietas tanaman
Cara memperoleh perlindungan	Otomatis deklarasi / publikasi ciptaan oleh pencipta.	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)	No Registration	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)	Pendaftaran <i>First to file</i> (Konstitutif)
Persyaratan substantif	Originalitas	Kebaruan / Novelty	Originalitas	Nilai ekonomi atas informasi bisnis/usaha/ resep	Kebaruan (proses atau produk)	Memiliki unsur pembeda dalam perdagangan	Baru, Unik, seragam, stabil, <i>be given name</i>
Masa Perlindungan	1. Seumur hidup + 70 tahun 2. 50 tahun sejak dipublikasikan	10 Tahun (sejak <i>filing date</i> )	10 tahun sejak didaftarkan/ dieksploitasi)	Selama kerahasiaannya terjaga	1. Paten sederhana 10 tahun 2. Paten 20	10 Tahun (sejak <i>filing date</i> ) dan bisa diperpanjang	20 tahun (tanaman musiman) 25 tahun

	3. 25 tahun sejak dipublikasikan				tahun	setelahnya	(tanaman menahun)
<b>Sanksi Pelanggaran HKI</b>	Denda max 4 juta, penjara max. 10 tahun ( <i>Piracy</i> )	Denda max. 300 juta , penjara max. 4 tahun	Denda max. 300 Juta, Penjara max. 3 tahun	Denda max. 300 juta, penjara max. 2 tahun	Denda max. 500 juta, penjara max. 4 tahun	Denda max. 1 juta, penjara max. 5 tahun	Denda max. 2,5 juta, penjara max. 7 tahun

D. Peta Indikasi Geografis Indonesia



No	Provinsi	Produk	Pemilik
1	Aceh	Kopi Arabika Gayo	Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)
		Minyak Nilam Aceh	Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA)
		Jeruk Keprok Gayo-Aceh	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Keprok Gayo-Aceh
		Pala Tapaktuan Blangpidie Aceh	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tapaktuan Blangpidie
		Jeruk Pamelon Matang Bireuen	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Jeruk Pamelon Matang Bireuen
2	Sumatera Utara	Kopi Arabika Sumatera Simalungun	Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS)
		Kopi Arabika Sumatera Mandailing	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG-KM)
		Kopi Arabika Sumatera Lintong	Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Lintong (MASPEKAL)
		Kopi Arabika Sipirok	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Sipirok
		Kopi Arabika Pulo Samosir	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Pulo Samosir
		Kopi Robusta Sidikalang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Sidikalang
		Kopi Arabika Tanah Karo	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo
		Kopi Arabika Tapanuli Utara	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tapanuli Utara (MPIG-KATU)
		Gambir Simsim Pakpak Bharat	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gambir Simsim Pakpak Bharat
		Kopi Arabika Toba	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toba

		Pisang Kepok Nias	Asosiasi Petani Perlindungan Indikasi Geografis Pisang Kepok Nias
3	Sumatera Barat	Songket Silungkang	Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Songket Silungkang (MPIG-SS)
		Bareh Solok	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Bareh Solok
		Songket Pandai Sikek	Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Songket Pandai Sikek
4	Riau	Kopi Liberika Rangsang Meranti	Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)
		Sagu Meranti	Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti
5	Kepulauan Riau	Sagu Lingga	Perhimpunan Pendayaguna Sagu Indonesia (PPSI) Cabang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
		Salak Sari Intan Bintan	Asosiasi Petani Salak Sari Intan Bintan
6	Sumatera Selatan	Kopi Robusta Semendo	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Apik Jurai
		Kopi Robusta Empat Lawang	Perhimpunan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang
		Duku Komering	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Duku Komering Sumatera Selatan
		Kopi Robusta Pagaralam	Perhimpunan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang
		Gambir Toman Musi Banyuasin	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gambir Gindesugi Musi Banyuasin
		Kopi Robusta Ogan Komering Ulu Selatan	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
		Kopi Robusta Lahat	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lahat
		Kopi Liberika Tungkal Jambi	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Tungkal Jambi

7	Jambi	Kayumanis Koerintji	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayu Manis Koerintji Jambi (MPIG-K2J)
		Kopi Arabika Sumatera Koerintji	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Puncak Kerinci Jambi
		Kopi Robusta Sumatera Merangin	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Masurai Sei. Tenang 'Jangkat'
		Nanas Tangkit Baru Jambi	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Tangkit Baru Jambi
		Kopi Robusta Sungai Penuh	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Sungai Penuh
8	Bengkulu	Kopi Robusta Kepahiang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kepahiang
		Kopi Robusta Rejang Lebong	Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rejang Lebong (MP2IG-KRRL)
		Batik Besurek Bengkulu	Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kain Besurek Batik Bengkulu
		Tenun Bumpak Seluma	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Bumpak Seluma
		Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
9	Kepulauan Bangka Belitung	Lada Putih Muntok	Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		Madu Teran Belitong Timur	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Belitong Timur
		Madu Pelawan Namang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Pelawan Namang
		Kopi Robusta Lampung	Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL)

10	Lampung	Lada Hitam Lampung	Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada Hitam Lampung
		Manggis Saburai Tanggamus	Masyarakat Indikasi Geografis Manggis Saburai Tanggamus
11	Banten	Rambutan Parakan Tangerang	Perkumpulan Rambutan Parakan Asli Kabupaten Tangerang
12	DKI Jakarta	Duku Condet	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Duku Condet Jakarta Timur (Kelompok Tani Cagar Buah Condet Lestari)
13	Jawa Barat	Tembakau Hitam Sumedang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang
		Tembakau Mole Sumedang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang
		Ubi Cilembu Sumedang	Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI)
		Kopi Arabika Java Preanger	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger-Jabar
		Beras Pandanwangi Cianjur	Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C)
		Teh Java Preanger	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger
		Sawo Sukatali Sumedang	Asosiasi Petani Sawo (ANISA) Kabupaten Sumedang
		Kopi Robusta Java Bogor	Yayasan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Java Bogor
		Batik Complongan Indramayu	Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (KMPIG) Batik Complongan Indramayu
		Kopi Arabika Java Sukapura Tasikmalaya	Perkumpulan Petani Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sukapura Tasikmalaya
		Kopi Java Sanggabuana Karawang	Perkumpulan Petani Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Sanggabuana Karawang
Batik Tulis Merawit Cirebon	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon		

14	Jawa Tengah	Mebel Ukir Jepara	Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ)
		Purwaceng Dieng	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng
		Carica Dieng	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng
		Tembakau Srinthil Temanggung	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Srinthil Temanggung
		Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing
		Kopi Robusta Temanggung	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT)
		Ikan Uceng Temanggung	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung (MPIGIUT)
		Genteng Sokka Kebumen	Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen
		Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara
		Sarung Batik Pekalongan	Paguyuban Sarung Batik Pekalongan
		Kopi Robusta Gunung Kelir Semarang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Gunung Kelir Semarang
		Batik Tulis Lasem	Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Lasem
		Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Merapi Merbabu Magelang
		Nanas Madu Pemasang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Madu Pemasang
Batik Wonogiri	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Wonogiren		

		Kopi Arabika Java Semarang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Semarang
15	D. I. Yogyakarta	Salak Pondoh Sleman Jogja	Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman
		Gula Kelapa Kulon Progo Jogja	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulon Progo Jogja
		Batik Tulis Nitik Yogyakarta	Paguyuban Batik tulis Nitik Yogyakarta
		Gerabah Kasongan Bantul	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan
		Kopi Robusta Merapi Sleman	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Merapi Sleman
16	Jawa Timur	Kopi Arabika Java Ijen-Raung	Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG)
		Bandeng Asap Sidoarjo	Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo
		Kopi Robusta Pasuruan	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan (MPIG KRP)
		Kopi Arabika Hyang Argopuro	Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Hyang Argopuro
		Kopi Arabika Pasuruan	Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Pasuruan
		Mangga Putar Pasuruan	Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mangga Putar Kabupaten Pasuruan
		Kopi Robusta Java Raung Gunitir Jember	Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Raung Gunitir Jember
		Kopi Robusta Java Argopuro Jember	Perkumpulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Java Argopuro Jember

		Kopi Excelsa Jombang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Excelsa Jombang
		Kopi Robusta Java Banyuwangi	MPIG Kopi Robusta Bumi Blambangan Banyuwangi
		Bawang Merah Sumenep	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Bawang Merah Sumenep
17	Kalimantan Barat	Beras Raja Uncak Kapuas Hulu	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Raja Uncak Kapuas Hulu
		Kopi Liberika Kayong Utara	Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Kopi Liberika Kayong Utara (MPIGKLU)
18	Kalimantan Timur	Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat	Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat (KMPIG-TDBJKB)
		Lada Malonan Kutai Kartanegara Kaltim	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)Lada Malonan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
		Kakao Berau	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kakao Berau
		Gula Aren Tuana Tuha Kutai Kartanegara	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Aren Kampung Belayan Kabupaten Kutai Kartanegara
		Beras Talun Koyem Barito Utara	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Talun Koyem
		Beras Adan Krayan	Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan
19	Kalimantan Tengah	Beras Siam Epang Sampit	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit
		Garam Gunung Krayan	Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Gunung Krayan
20		Cabai Rawit Hiyung Tapin	Asosiasi Petani Cabai Rawit Hiyung
		Sasirangan Kalimantan Selatan	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sasirangan Kalimantan Selatan

	Kalimantan Selatan		
21	Sulawesi Utara	Cengkeh Minahasa	Masyarakat Perlindungan Cengkeh Minahasa (MPCM)
		Pala Siau	Lembaga Perlindungan Indikasi Geografis (LPIG) Pala Siau
		Kopi Arabika Minahasa	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Kabupaten Minahasa
22	Sulawesi Tengah	Sidat Marmorata Poso	Kelompok Usaha Bersama Daerah Asal Sidat Masapi Marmorata (DASM2)
		Tenun Nambo	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo
		Tenun Donggala	Asosiasi Tenun Donggala
23	Sulawesi Tenggara	Mete Muna	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mete Muna
		Ikan Teri Waburense Buton Tengah	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Teri Buton Tengah
24	Sulawesi Selatan	Kopi Arabika Kalosi Enrekang	Masyarakat Perlindungan Kopi Enrekang (MPKE)
		Kopi Arabika Toraja	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja
		Lada Luwu Timur	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lada Luwu Timur
		Beras Pulu' Mandoti Enrekang	Asosiasi Petani Pulu' Mandoti Enrekang
		Kopi Arabika Bantaeng	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Bantaeng
		Kopi Arabika Rumbia Jenepono	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Rumbia
		Jeruk Pamelu Pangkep	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Jeruk Pamelu Pangkep
		Kopi Arabika Seko Luwu Utara	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Seko

		Tenun Sutera Sengkang	SILK SOLUTION CENTRE
25	Gorontalo	Kopi Robusta Pinogu	Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Pinogu Bone Bolango (MIG-KRPBB)
		Gula Aren Atinggola Gorontalo Utara	Lembaga Indikasi Geografis Gula Aren Atinggola
		Sulaman Karawo Gorontalo	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sulaman Karawo Gorontalo
26	Sulawesi Barat	Tenun Sutera Mandar	Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sarung Sutera Mandar
		Tenun Sekomandi Kalumpang	Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sekomandi
27	Bali	Kopi Arabika Kintamani Bali	MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali
		Mete Kubu Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali
		Garam Amed Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali
		Tenun Gringsing Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB)
		Kopi Robusta Pupuan Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pupuan (MPIG-KRP)
		Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali	Celuk Design Center (CDC)
		Salak Sibetan Karangasem Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Sibetan Karangasem Bali
		Garam Kusamba Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Kusamba Bali
		Garam Tejakula	MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS GARAM TEJA LESTARI (MPIG-GTL)

		Garam Gumbrih	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Gumbrih
		Lukisan Kamasan Bali	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Lukisan Kamasan Bali
28	Nusa Tenggara Barat	Susu Kuda Sumbawa	Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa
		Kangkung Lombok	Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok
		Madu Hutan Sumbawa	Jaringan Madu Hutan Sumbawa
		Kopi Robusta Tambora	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Tambora (MPIG-KRT)
		Mutiara Lombok	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mutiara Lombok
		Kopi Arabika Sembalun Lombok	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sembalun Lombok
		Garam Pemongkong Lombok Timur	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis GARAM PEMONGKONG LOMBOK TIMUR
		Kopi Arabika Flores Bajawa	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa
		Vanili Kep. Alor	Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA)
		Jeruk SoE Mollo	Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM)
		Tenun Ikat Sikka	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sikka (MPIG-TIS)
		Kopi Arabika Flores Manggarai	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai
		Tenun Ikat Alor	Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA)
		Tenun Songket Alor	Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTIS)

29	Nusa Tenggara Timur	Gula Lontar Rote	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Lontar Rote
		Kopi Robusta Flores Manggarai	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Flores Manggarai
		Tenun Ikat Ngada	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Ngada
		Tenun Ikat Fehan Malaka	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Malaka
		Tenun Ikat Flores Timur	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Flores Timur
		Tenun Buna Insana Timor Tengah Utara	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Timor Tengah Utara
		Tenun Amarasi Kupang	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Amarasi Kupang
30	Maluku	Tenun Ikat Tanimbar	Lembaga Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
		Pala Kepulauan Banda	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Kepulauan Banda
31	Maluku Utara	Cengkeh Moloku Kie Raha	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG-CMKR)
		Pala Dukono Halmahera Utara	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Dukono Halmahera Utara
32	Papua Barat	Pala Tomandin Fakfak	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG-PTF)
		Kakao Ransiki	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kakao Ransiki
33	Papua	Kopi Arabika Baliem Wamena	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Baliem Wamena (MPIG-KABW)
		Beras Merauke	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Merauke

